



**ANALISIS TENTANG PENGARUH TIMBAL BALIK ANTARA PENGELUARAN  
DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA KEDIRI TAHUN 1990-2000**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelara Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember

Asal:	Hadiah	Klass
Terima:	23 JUL 2002	5376
No. Induk:	1243	HUD
KLASIR / E. YATI		a e.

Oleh

*Eny Hudaibiyah*

NIM. 980810101368

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2 0 0 2**

## JUDUL SKRIPSI

ANALISIS TENTANG PENGARUH TIMBAL BALIK ANTARA PENGELUARAN  
DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA KEDIRI TAHUN 1990 - 2000

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : ENY HUDAIBIYAH

N. I. M. : 980810101368

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

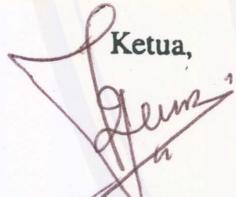
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

18 MEI 2002

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

### Susunan Panitia Penguji

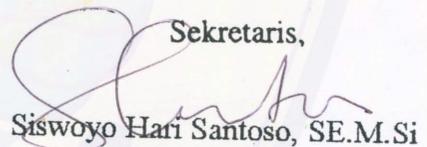
Ketua,



Drs. Zainuri, M.Si

NIP. 131 832 336

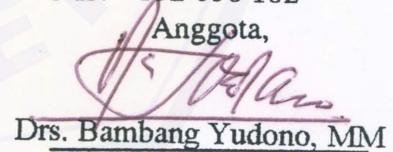
Sekretaris,



Siswoyo Hari Santoso, SE.M.Si

NIP. 132 056 182

Anggota,

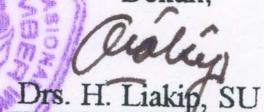


Drs. Bambang Yudono, MM

NIP. 130 355 409

Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi

Dekan,



Drs. H. Liakif, SU

NIP. 130 531 976



**TANDA PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Analisis Tentang Pengaruh Timbal Balik Antara  
Pengeluaran Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di  
Kota Kediri Tahun 1990 - 2000

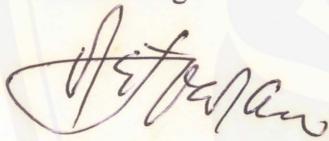
Nama Mahasiswa : Eny Hudaibiyah

Nim : 980810101368

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Kosentrasi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan

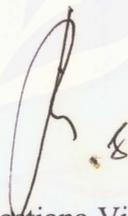
Pembimbing I



Drs. Bambang Yudono, MM

NIP. 130. 355. 409

Pembimbing II



Dra. Sebastiana Viphindartin, M. Kes

NIP. 131. 832. 296

Ketua Jurusan



Dra. Aminah, MM

NIP. 130.676.291

Tanggal Persetujuan: April 2002



**Untuk Ibu Robi'atul Adawiyah , Bapak Suparlan (Alm)  
..... untuk ciata dan do'a yang tulus  
dan tak pernah putus  
Almamaterku tercinta**

MOTTO

**"Subhaanal maalikil maksud"**

Maha Suci Allah Yang Maha Menguasai Segala Maksudku

*Pandanglah hari ini  
Sebab inilah hidup yang benar-benar hidup  
Dalam waktu yang singkat ini  
Terletak kebenaran dan kenyataan  
Sebab kemarin hanya mimpi  
Dan besok adalah bayangan hidup dirimu  
Tapi hari ini ada dan membuat kemarin jadi mimpi bahagia  
Dan besok jadi bayangan yang penuh pengharapan  
Oleh karena itu pandanglah hidupmu hari ini...!*

( Eny Hd )

**Berusaha tanpa berdoa itu sombong  
....berdoa tanpa berusaha itu bohong.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala nikmat-Nya sehingga di sela aktivitas yang mesti di lakukan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Yudono, MM dan Ibu Sebastiana Viphindartin, M Kes , yang dengan penuh perhatian telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Zainuri, MSi dan Bapak Siswoyo Hari Santoso, SE, MSi, selaku dosen penguji atas kesediannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Liakip, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
4. Ibu Dra. Aminah, MM selaku ketua jurusan Study Pembangunan.
5. Mbak Iik, mas Kamsori, mas Uma, mbak Ida, mbak Yuni, mas Sony, Shofa dan Leidha atas kasih sayang, perhatian dan motivasinya.
6. Jati Sumarno atas kesabaran, motivasi dan perhatiannya
7. Rekan-rekan seperjuangan: Maslikah, Yati, Bety, untuk kebersamaan dan ketulusan persahabatan, teman-teman kostku: mbak Ageng, Evi, Peni, Artini, Yusida, Datik, Erik, Eni, Nurul, Asih dan Indira serta Teman-teman SP-GP'98
8. Bapak Andreas staff kantor BPS kota Kediri, yang telah memberikan informasinya dan data sehubungan dengan penelitian ini
9. Semua pihak yang membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka penulis siap menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember,

Penulis



**DARTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan masalah.....	6
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya.....	8
2.2 Landasan teori.....	9
2.2.1 Teori pengeluaran Pemerintah.....	9
2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	12
2.2.3 Pengeluaran Pemerintah daerah Kota Kediri.....	16
2.3 Hipotesis.....	26
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Rancangan Penelitian.....	27
3.1.1 Jenis Penelitian.....	27
3.1.2 Unit Penelitian.....	27
3.1.3 Populasi.....	27

3.2 Metode Pengumpulan data.....	27
3.3 Metode Analisis Data.....	28
3.3.1 Uji Kausalitas Granger.....	29
3.3.2 Model Regresi Distribusi lag .....	30
3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya.....	33
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Penelitian .....	34
4.1.1 Pengeluaran Rutin Pemerintah Kota Kediri.....	36
4.1.2 Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Kota Kediri.....	41
4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri.....	50
4.2 Hasil Penelitian.....	54
4.3 Hasil Analisis hubungan Kausalitas Granger.....	55
4.3.1 Hasil Regresi Uji kausalitas Model Granger .....	56
4.4. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pengeluaran Pemerintah .....	59
4.4.1 Pengujian Statistik.....	61
4.5 Pembahasan.....	64
V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
1	Karakteristik tanah dan iklim di wilayah kota Kediri.....	34
2	Daftar luas lahan menurut penggunaannya di wilayah kota Kediri.....	35
3	Perkembangan penduduk hasil registrasi tahun 1990 – 2000.....	35
4	Jumlah penduduk menurut mata pencaharian di wilayah kota Kediri .....	36
5	Realisasi pengeluaran rutin pemerintah kota Kediri tahun 1990 – 2000.....	39
6	Realisasi pengeluaran pembangunan pemerintah kota Kediri tahun 1990 – 2000.. .....	48
7	Perkembangan ekonomi kota Kediri tahun 1990 – 2000.....	52
8	Pertumbuhan pengeluaran pemerintah kota Kediri dan PDRB tahun 1990 – 2000.....	54
9	Hasil regresi uji klausalitas model Granger .....	56
10	Kreteria hasil pengujian koefisien regresi antara PDRB dan pengeluaran pemerintah daerah kota Kediri .....	58
11	Analisa varian untuk pengujian regresi distribusi lag secara parsial .....	51
12	Analisa varian untuk pengujian regresi distribusi lag secara bersama –sama / serentak.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal
1	Perkembangan pengeluaran pemerintah berdasarkan pendapat Rostow – Musgrave dan Peacock - Wiseman .....	12
2	Aliran perekonomian tiga sektor .....	20



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Judul	Hai
1	Realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah kota Kediri tahun 1990 - 2000 .....	72
2	PDRB kota Kediri menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 1993 tahun 1990 – 2000 .....	76
3	Data perkembangan PDRB dan pengeluaran pemerintah kota Kediri bersifat kwartalan tahun 1990 - 2000 .....	77
4	Analisa hubungan kausalitas Model Granger .....	78
5	Analisa regresi distribusi lag PDRB terhadap penegeluaran pemerintah.....	98



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah dikembangkan atas dasar keutuhan Negara Kesatuan. Hubungan yang serasi tersebut diarahkan pula pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta menjamin perkembangan dan pembangunan daerah, dan dilaksanakan bersinergi secara sektoral dan regional. (Aziz, 1996: 178)

Proses pembangunan nasional ekonomi akan efisien jika memenuhi tiga ciri pokok yaitu: (1) ekonomi ini mampu memproduksi output nasional sesuai dengan preferensi sosial yang ada secara optimal dengan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam suasana kompetisi yang sehat, (2) terciptanya tingkat yang optimal dalam produksi barang dan jasa yang mencerminkan distribusi pendapatan yang ada, (3) ekonomi ini dilandasi dengan kondisi-kondisi yang kokoh untuk melakukan ekspansi yang optimal pada masa-masa yang akan datang. (Arief, 1995: 55)

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertumpu kepada trilogi pembangunan untuk mempercepat sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan untuk menyediakan semakin banyaknya barang-barang ekonomi kepada kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan ideologis yang diperlukan. Definisi ini mempunyai 3 komponen yang pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dari meningkatnya secara terus-menerus; kedua, teknologi maju merupakan faktor dari pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam menyediakan barang dan jasa kepada penduduk; ketiga penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian dibidang kelembagaan sebagai inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dinyatakan secara tepat.

Landasan konsepsional keuangan negara adalah Garis Besar haluan Negara (GBHN) sebagai landasan hukum atas konsepsi penyelenggaraan keuangan negara di suatu periode yang merupakan aktualisasi amanat konstitusional dalam penyelenggaraan keuangan negara menghadapi konteks tantangan dalam periode tertentu, yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan ketetapan Nomor II / MPR / 1993 tentang Kebijakanaksanaan pembangunan khususnya di bidang ekonomi antara lain :

1. Kebijakanaksanaan fiskal tetap didasarkan pada prinsip anggaran berimbang yang dinamis dengan memungkinkan dibentuknya dana cadangan pada masa penerimaan negara melebihi yang direncanakan dan dimanfaatkan dana cadangan tersebut pada masa penerimaan negara kurang dari yang direncanakan atau tidak cukup mendukung program yang telah direncanakan dari atau yang sangat mendesak sehingga terjamin kesinambungan pembiayaan yang diiringi oleh stabilitas ekonomi yang mantap. Penerimaan negara terus diupayakan peningkatannya dengan menggali dan mengembangkan semua sumber lainnya, dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan oleh masyarakat dan dunia usaha. Pengeluaran negara direncanakan secara cermat berdasarkan prioritas yang tajam untuk memberikan dampak yang sebesar – besarnya bagi pembangunan negara. Tabungan pemerintah terus diupayakan peningkatannya dalam rangka peningkatan tabungan nasional.

2. Penganggaran negara yang meliputi pendapatan dan belanja negara perlu ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan negara, baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan, penganggaran rutin dan pembangunan perlu lebih dipersiapkan serta dimantapkan menurut perencanaan penganggaran yang berlanjut, berahap dan makin meningkat dengan orientasi hasil bunga yang maksimal.

3. Sumber dana dari luar negeri dimanfaatkan sebaik – baiknya bagi pembangunan nasional sebagai sumber pelengkap pembiayaan pembangunan dan sebagai wahana alih teknologi yang efektif. Penanaman modal asing terus

per-kapita, karena dengan adanya penyebaran hasil produksi/ pendapatan masyarakat ini berarti menuju ke pendapatan per-kapita yang tinggi. (Aziz, 1996:31)

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dapat dilihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. PDRB suatu daerah dapat ditingkatkan apabila investasi fisik dan non fisik di daerah tersebut meningkat. Investasi fisik dan non fisik akan meningkat jika ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai yang disediakan oleh kota Kediri.

Untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan investasi fisik dan non fisik, maka dibutuhkan dana yang dipungut dari pajak dan bukan pajak. Dengan demikian keberhasilan kota Kediri dalam meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan pajak, bukan pajak, dan penerimaan pembangunan untuk pembiayaan pengeluaran daerah akan dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Kediri. Meningkatnya PDRB ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kota Kediri cukup baik.

Keberhasilan Pemerintah kota Kediri dalam menghimpun penerimaan daerah akan dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah. Meningkatnya pengeluaran pemerintah daerah ini akan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah Kediri. Hal ini terbukti dari tahun 1990/1991 sampai dengan tahun 2000/2001, dimana ada beberapa tahun anggaran, pertumbuhan pengeluaran pemerintah kota Kediri selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonominya.

Pada tahun 1991/1992, pertumbuhan pengeluaran kota Kediri sebesar -2,64 % dan pertumbuhan ekonominya sebesar 16,97 %. Tahun 1992/1993, pertumbuhan pengeluaran kota Kediri sebesar 52,47 % dan pertumbuhan ekonominya sebesar 18,79%. Tahun 1993/1994, pertumbuhan pengeluaran kota Kediri sebesar -2,78 % dan pertumbuhan ekonominya sebesar 22,18 %. Tahun

1994/1995, pertumbuhan pengeluaran kota Kediri sebesar 14,83 % dan pertumbuhan ekonominya sebesar 12,91%. Tahun 1995/1996, pertumbuhan pengeluaran kota Kediri sebesar 1,88 % dan pertumbuhan ekonominya sebesar 13,40 %. Tahun 1996/1997, pertumbuhan pengeluaran kota Kediri sebesar 10,84 % dan pertumbuhan ekonominya sebesar 13,18%. Tahun 1997/1998, pertumbuhan pengeluaran kota Kediri sebesar 30,20 % dan pertumbuhan ekonominya sebesar 11,81 %. Tahun 1998/1999, pertumbuhan pengeluaran kota Kediri sebesar 85,40 % dan pertumbuhan ekonominya sebesar -2,49%. Tahun 1999/2000, pertumbuhan pengeluaran kota Kediri sebesar 46,47 % dan pertumbuhan ekonominya sebesar 1,41 %. Tahun 2000/2001, pertumbuhan pengeluaran kota Kediri sebesar 3,87% dan pertumbuhan ekonominya sebesar 5,80%.

Berdasarkan uraian tentang pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi kota Kediri, maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah mempunyai pengaruh timbal balik terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Kediri. Pengeluaran pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota Kediri dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi juga mempunyai pengaruh terhadap pendapatan atau penerimaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah kota Kediri. Hal ini berarti jika pengeluaran meningkat maka pendapatan/penerimaan pemerintah juga naik, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan juga naik, karena penerimaan dari pengeluaran juga naik.

## 1.2 Perumusan Masalah

Pembangunan di daerah dalam pelaksanaannya memerlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya untuk membiayai pengeluaran daerah apalagi dengan diterapkannya Undang-Undang otonomi daerah dimana kabupaten/kotamadya diharapkan meningkatkan tingkat kemandirian daerah. Laju pertumbuhan realisasi

total penerimaan APBD kota Kediri yang menunjukkan kemampuan daerah dalam usaha membiayai pengeluaran daerah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Kediri.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh timbal balik antara pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi di kota Kediri tahun 1990 – 2000.

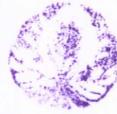
### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh timbal balik anggaran pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi di kota Kediri tahun 1990 – 2000.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai:

1. bahan perbandingan yang diharapkan dapat memberikan gambaran bagi penelitian pada topik yang sama, yang kemungkinan dapat dikembangkan variabel lain untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri,
2. keputusan yang berkaitan dengan anggaran pengeluaran pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikota Kediri.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Lilyan (1999) dalam penelitian tentang Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi di Indonesia Tahun 1989 - 1998 membuktikan bahwa ada hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dalam hal ini Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan Investasi di Indonesia tahun 1989 - 1998. Hal ini dapat dilihat dari koefisien  $b_j$  maupun  $d_j$  yang besarnya tidak sama dengan 0 ( $b_j \neq 0$  dan  $d_j \neq 0$ ) hal tersebut sesuai dengan landasan teori penelitian sebelumnya yang mendukung hipotesa yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil analisis dengan menggunakan regresi linear berganda dalam penelitian setelah di uji dengan uji t (t test) ternyata tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya dan teori yang ada. Hal ini terlihat pada hasil t hitung di PMDN yang lebih kecil dari t tabel pada tingkat signifikansi 90 %. Sedangkan menurut hipotesa yang ada PMDN dan PMA mempunyai pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB). Namun untuk PMA, hasilnya signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga hasil penelitian ini tidak dapat secara keseluruhan membuktikan hipotesa yang ada.

Penelitian yang dilakukan Zawawi (2001) tentang Pengaruh Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Jember Tahun 1990 /1991 - 1999 /2000. Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel subsidi dari pemerintah pusat dan PAD sebagai variabel bebas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten jember sebagai variabel terikat. Hasil uji statistik, dengan uji F bahwa subsidi dari pemerintah pusat dan PAD secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi kabupaten jember, dan uji t menunjukkan bahwa variabel subsidi dari pemerintah pusat dan PAD secara individu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kabupaten Jember.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan suatu kebijakan pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Kebijakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan menentukan pengeluaran pemerintah yang dibiayai pajak dan bukan pajak memberi dampak yang tidak kecil terhadap penerimaan daerah.

Model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pemerintah dengan tahap – tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal dari perkembangan ekonomi presentase investasi pemerintah dari total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan karena perkembangan ekonomi. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin erat.

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap Gross National Product ( GNP ) semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase Gross National Product (GNP ) akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran – pengeluaran untuk aktivitas sosial.

Wagner mengemukakan pada teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP. Inti Hukum Wagner adalah dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Disini peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena

pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat (Mangkoesobroto, 1996:141).

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu : tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan ketahanan; kenaikan tingkat pendapatan masyarakat; urbanisasi yang mengiring pertumbuhan ekonomi; perkembangan demokrasi; dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiring perkembangan pemerintah (Dumairy, 1997:162).

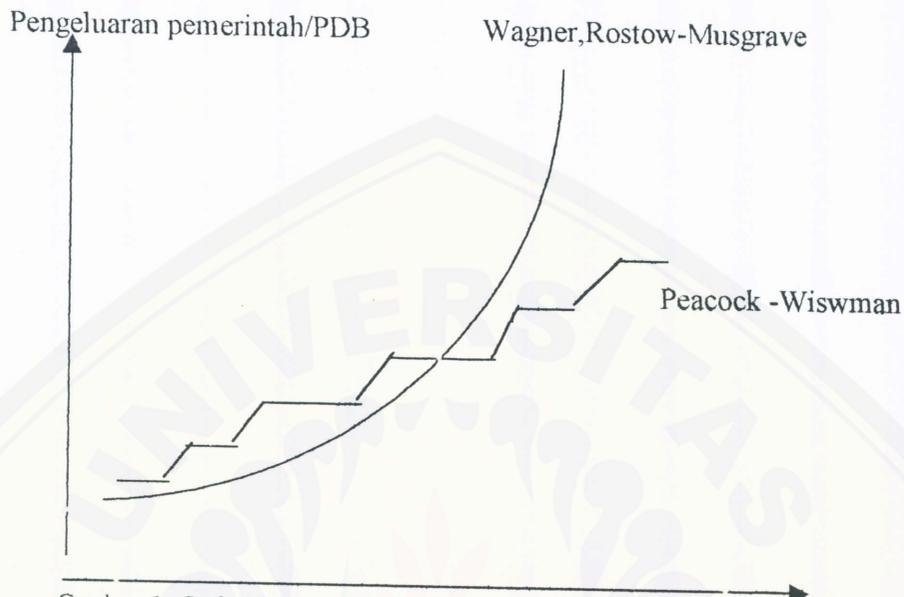
Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapatan lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis “dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah”. Pemerintah selalu berusaha membesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang semakin besar. Mengacu pada teori pemungutan suara (*voting*), mereka berpendapat bahwa masyarakat mempunyai batas toleransi pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala yang membatasi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara tidak semena-mena atau sewenang-wenang (Dumairy, 1997:163).

Teori Peacock dan Wiseman adalah Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatkan penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, peningkatan pendapatan nasional menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar (Mangkoesobroto, 1996:143).

Apabila dalam keadaan normal terganggu adanya eksternalitas, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya, timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk investasi dan dana modal kerja menjadi berkurang. Efek ini

disebut efek penggantian (*displacement effect*). Postulat yang berkenaan dengan efek ini menyatakan, gangguan sosial dalam perekonomian menyebabkan aktivitas swasta di gantikan oleh aktivitas pemerintah. Pengawasan gangguan, acapkali tidak cukup dibiayai semata-mata dengan pajak, sehingga pemerintah mungkin harus juga meminjam dana luar negeri. Setelah gangguan teratasi, muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah pun kian membengkak karena baru tersebut. Akibat lebih lanjut ialah pajak tidak turun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah selesai.

Jika pada saat terjadinya gangguan sosial dalam perekonomian timbul efek penggantian, maka sesudah gangguan berakhir timbul pula sebuah efek lain yang disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Postulat efek ini menyatakan, gangguan sosial menumbuhkan kesadaran masyarakat akan adanya hal-hal yang perlu ditangani oleh pemerintah sesudah redanya gangguan tersebut. Kesadaran semacam itu menggugah kesediaan masyarakat untuk membayar pajak lebih besar, sehingga memungkinkan pemerintah memperoleh penerimaan yang lebih besar pula. Dalam grafik, perkembangan pengeluaran pemerintah bukanlah berpola kurva mulus berlereng positif sebagaimana tersirat dalam pendapat Rostow-Musgrave, melainkan berlereng positif dengan bentuk patah-parah seperti tangga.



Gambar 1: Perkembangan pengeluaran pemerintah berdasarkan pendapat Rostow-Musgrave dan Peacock-Wiswman

Sumber : Mangkoesobroto(1996: 143)

### 2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan suatu barang dan jasa dari luar daerah. (Arsyad, 1999:116)

Kuznets mendefinisikan bahwa pertumbuhan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan untuk menyesuaikan semakin banyak jenis barang dan jasa kepada masyarakat. Kemampuan itu tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan ideologis yang diperlukan

Teori Harrod-Domar pada hakikatnya berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan yang mantap atau *steady growth* yang di definisikan sebagai pertumbuhan yang akan selalu menciptakan pengurangan sepenuhnya alat-alat modal akan selalu berlaku dalam ekonomi. Dalam teori Harrod Domar bahwa pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan sesuatu perekonomian untuk menghasilkan barang

maupun pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Pembentukan modal ini berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Investasi itu mempunyai dua sifat yaitu menciptakan pendapatan dan meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian.

Menurut Teori Klasik ( Sukirno, 1985: 286) bahwa pembentukan modal adalah pengeluaran yang mempertinggi jumlah alat-alat modal dalam masyarakat. Kalau kesanggupan tersebut bertambah, maka dengan sendirinya produksi dan pendapatan nasional akan bertambah tinggi dan pembangunan akan tercipta. Kaum Klasik berpendapat bahwa *Supply Creates its Own Demand* berarti bertambahnya alat-alat modal yang terdapat dalam masyarakat akan dengan sendirinya menciptakan pertambahan produksi nasional dan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi.

Teori pembangunan regional dalam hal meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi regional, menggunakan teori lokasi (*Location theory*) sebagai pangkal tolak pengembangan teori pembangunan berdasarkan tahapan-tahapan yaitu tahap ekonomi subsistence, tahap industri yang sederhana sesuai dengan perbaikan dalam transportasi, tahap perdagangan antar daerah, tahap industrialisasi dengan meninggalkan tipe produksi yang ekstraktif pertanian, dan tahap industri tertier untuk tujuan ekspor dalam bentuk ekspose modal, tenaga terampil, dan jasa-jasa untuk daerah yang berkembang (Nurdin, 1995 : 87).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ekonomi suatu daerah. Disamping itu PDRB juga dapat digunakan sebagai alat melihat struktur perekonomian daerah melalui peranan setiap lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB daerah bersangkutan. (Nota Keuangan Negara, 1999:69)

Pembangunan ekonomi mempunyai tiga unsur penting yaitu ( Arsyad, 1999:6):

1. Suatu proses (perubahan yang terjadi terus menerus),
2. Usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan perkapita,

3. Kenaikan pendapatan perkapita terus berlangsung dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi itu sendiri perlu dipandang sebagai suatu proses supaya saling berkaitan dan berhubungan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi tersebut. Dengan cara analisis ini dapat diketahui deretan peristiwa yang timbul yang akan mewujudkan peningkatan dalam kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap berikutnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung sebagai jumlah nilai yang ditambah melalui sisi pengeluaran maupun sisi pendapatan. Sisi pengeluaran menghitung nilai pengeluaran total yang diperlukan untuk membeii keluaran nasional, sedangkan sisi pendapatan menghitung nilai total pendapatan yang dihasilkan oleh produksi keluaran itu (Lipsey, 1995 :56).

Pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Untuk menghitungnya dapat digunakan tiga cara (Sukirno, 1985:17) yaitu:

#### 1. Cara Pengeluaran

Cara pengeluaran adalah cara menentukan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai golongan pembeli dalam masyarakat. Dalam cara ini yang dihitung bukanlah nilai dari setiap transaksi diantara penjual dan pembeli, yang dihitung hanya meliputi nilai transaksi barang dan jasa. Hal ini dilakukan untuk menghindari berlakunya apa yang dinamakan perhitungan dua kali ( *double counting* ), yaitu menghitung nilai suatu barang yang diciptakan kedalam pendapatan nasional sebanyak dua atau beberapa kali.

Dalam menghitung pendapatan nasional dengan cara pengeluaran sektor-sektor ekonomi dibedakan menurut sifat-sifat pembeli dalam masyarakat. Dalam analisa makro ekonomi, berdasarkan pada sifat-sifat pengeluaran yang mereka lakukan, para pembeli dalam masyarakat dibedakan dalam 4 golongan: rumah tangga, pengusaha, pemerintah, dan sektor luar negeri (ekspor dan import). Dengan maksud memberikan data yang sesuai dengan yang diperlukan oleh

analisa makro ekonomi, dalam menghitung pendapatan nasional menurut cara pengeluaran, para pembeli yang ada dalam perekonomian dibedakan dengan cara pengeluaran.

Jadi menurut cara pengeluaran, cara untuk menentukan pendapatan nasional yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai pengeluaran rumah tangga, pengeluaran para pengusaha, pengeluaran pemerintah dan pendapatan ekspor dikurangi dengan pendapatan atas barang-barang import. Nilai pendapatan yang diperoleh dinamakan Produk Nasional Bruto atau *Gross National Product* (GNP).

## 2. Cara Produksi

Menurut cara produksi, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor produktif yang ada dalam perekonomian. Untuk menghitung pendapatan nasional dengan cara produksi, yang pertama-tama dilakukan adalah menentukan nilai produksi yang diciptakan dalam tiap-tiap sektor. Nilai yang diperoleh dalam pendapatan nasional dinamakan Produk Domestik Bruto atau *Gross Domestic Product* (GDP).

## 3. Menjumlahkan pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa.

Jadi yang dijumlahkan dalam menghitung pendapatan nasional dengan cara ketiga adalah pendapatan yang diperoleh para pekerja, pendapatan para pengusaha dan pendapatan pemilik modal. Nilai yang diperoleh dinamakan Pendapatan Nasional atau *National Income* (NI). Dengan demikian istilah pendapatan nasional dapat diartikan dalam dua pengertian. Dalam perhitungan pendapatan nasional (*National Income Accounting*), seperti ini merupakan pendapatan dari faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan menurut pengertian yang umum, pendapatan nasional adalah produksi nasional suatu negara.

Berdasarkan teori cara menghitung pendapatan diatas, maka untuk pendapatan pada wilayah regional disebut sebagai Pendapatan Domestik regional Bruto (PDRB).

### 2.2.3 Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pembangunan daerah merupakan semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah yang meliputi berbagai sumber pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah (APBD dan APBN) dan yang bersumber dari masyarakat.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh kota Kediri di biayai oleh pemerintah pusat sebagai pelaksana asas dekonsentrasi dan pemerintah kota Kediri sebagai pelaksana asas desentralisasi dan perbantuan. Pembangunan yang merupakan kewajiban pemerintah kota Kediri dibiayai dari sumber Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasikan potensi keuangan. Apabila penerimaan dari sumber daerah cukup besar maka mengurangi ketergantungan daerah yang bersangkutan terhadap pusat. Disamping itu besarnya APBD suatu daerah akan berarti besar pula tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Peranan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dapat dibagi menjadi empat, yaitu (Dumairy, 1997:158):

1. Peran alokatif, yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi,
2. Peran distributif, yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar,
3. Peran stabilisatif, yaitu peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium,
4. Peran dinamisatif, yaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju.

Keempat peranan tersebut dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan keempat peranan ini mengakibatkan APBD telah menjadi instrumen kebijakan ekonomi makro, terlebih sejak turunnya harga minyak bumi dan berkurangnya sumber dana luar negeri.

Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengeluaran pemerintah secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Klasifikasi penggolongan ini mirip seperti klasifikasi pengeluaran ke dalam pos-pos pengeluaran lancar dan pos-pos pengeluaran kapital. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintah sehari-hari, meliputi belanja pegawai; belanja barang; berbagai subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang); angsuran dan bunga utang pemerintah; serta sejumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah murni dan bantuan proyek (Dumairy,1997:165).

Dana rupiah murni pembangunan adalah dana yang bersumber dari tabungan pemerintah dan bantuan program yaitu bantuan luar negeri yang di rupiahkan. Dana rupiah murni ini digunakan untuk: pertama, pengeluaran habis pakai berupa pengeluaran untuk proyek-proyek yang secara langsung tidak menghasilkan return kepada pemerintah tetapi secara tidak langsung memberi dampak luas kepada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, seperti proyek jalan, jembatan, pengairan, pendidikan, atau transmigrasi; kedua, pengeluaran transfer yang ditujukan untuk bantuan pembangunan daerah, penyertaan modal pemerintah dan subsidi, seperti bantuan pembangunan desa, bantuan pembangunan kotamadya/kabupaten, penyertaan modal pemerintah di BUMN yang memerlukan suntukan modal, subsidi pupuk, subsidi benih dan sebagainya (Badjuri,1999: 82).

Pengeluaran yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas (Dumairy, 1997: 168):

1. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa disebut pengeluaran pemerintah, meliputi semua pengeluaran pemerintah dimana pemerintah secara langsung menerima balas jasa. Pengeluaran pemerintah, antara lain pembayaran gaji pegawai, pembelian barang dan jasa.
2. Transfer pemerintah meliputi pengeluaran pemerintah dimana pemerintah tidak menerima jasa langsung atas pengeluaran tersebut. Bentuk transfer pemerintah antara lain, sumbangan atas bencana alam, pembayaran pensiun, pemberian beasiswa, subsidi bahan bakar minyak.
3. Investasi pemerintah meliputi semua pengeluaran dalam rangka memperbesar kapasitas produksi nasional, yang biasanya dalam bentuk aktivitas-aktivitas untuk menghasilkan barang publik.

Ada empat prinsip pengeluaran pemerintah yang seharusnya menjadi landasan dalam politik pengeluaran pemerintah, yaitu (Badjuri, 1997;76):

1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang;
2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat;
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang;
4. Merupakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

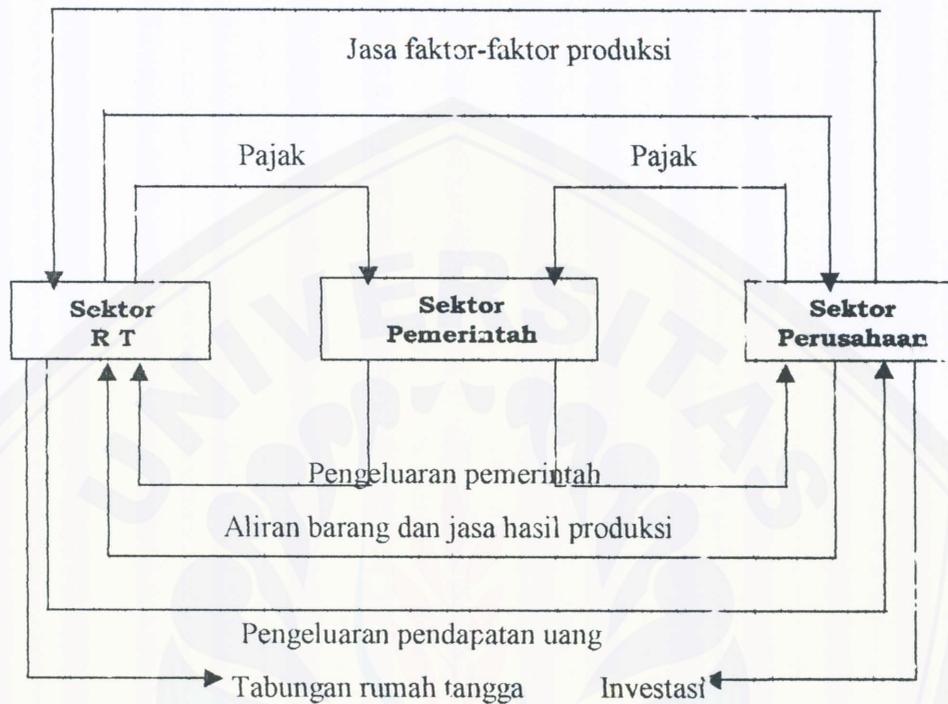
Dengan prinsip-prinsip tersebut diatas, dapat dibedakan macam-macam pengeluaran negara (Suparmoko, 1996;48):

1. Pengeluaran yang self liquidating sebagian atau seluruhnya artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa atau barang-barang yang

- bersangkutan. Contohnya, pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara, atau proyek-proyek produktif barang ekspor,
2. Pengeluaran yang reprodktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkatan penghasilan atau sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Contohnya, pengeluaran untuk bidang pertanian, pengairan, pendidikan, kesehatan masyarakat dan sebagainya,
  3. Pengeluaran yang tidak self liquiditing maupun yang tidak reprodktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat, misalnya untuk bidang-bidang rekreasi, pendirian monumen, objek-objek turisme dan sebagainya. Dalam hal ini dapat juga menaikkan pendapata nasional dalam arti jasa-jasa tersebut,
  4. Pengeluaran yang secara langsung tidak reprodktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat terjadi pendapatan perorangan yang penerimaannya akan meningkat,
  5. Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa yang akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka dimasa yang akan datang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar.

Pengeluaran pemerintah terhadap pendapatar nasional untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian atau kegiatan pembangunan dibiayai oleh pajak dan tabungan swasta yang dapat dilihat dalam aliran perekonomian tiga sektor di bawah ini.

Pembayaran pendapatan uang  
Untuk jasa faktor-faktor produksi



Gambar 2: Aliran perekonomian Tiga sektor  
Sumber : [www. Ut.ac.id/ol-supp/ekon4110/m4.htm](http://www.Ut.ac.id/ol-supp/ekon4110/m4.htm).

Pembangunan akan melaju secara lebih mandiri apabila pembangunan itu untuk sebagian terbesar dapat dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan tidak terlalu banyak tergantung dari sumber pembiayaan dari luar. Sumber-sumber pembiayaan dalam negeri yang dimaksud adalah total penerimaan pajak setelah dikurangi total pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutinnnya.

Dampak pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional akan berbeda antara dibiayai oleh pajak atau dibiayai tabungan swasta sehingga pembiayaan pengeluaran daerah dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan

berdaya guna. Kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan pajaknya berarti meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunannya dari sumber daya dalam negeri sendiri.

Daerah dalam usaha melaksanakan program pembangunan dihadapkan pada dua pilihan yang masing-masing membawa resiko. Disatu pihak bila daerah tidak mau bergantung dari sumber pembiayaan pembangunan dari luar, maka laju pertumbuhan ekonomi sudah tentu akan lebih kecil dan kecepatan mengejar ketinggalan dari daerah yang maju akan sangat rendah, daerah yang baru berkembang makin lama makin jauh ketinggalan dari daerah yang maju. Dipihak lain, laju pertumbuhan ekonomi mungkin akan lebih tinggi apabila sumber pembiayaan pembangunan itu selain dari dalam negeri juga dari luar negeri (pinjaman/utang luar negeri). Pilihan yang tergantung dari luar negeri ini tentu memberi peluang lebih besar akan adanya gangguan terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri karena pekanya kondisi ekonomi dalam negeri terhadap pasang surutnya perekonomian dunia. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dicapai apabila sumber pembiayaan dari luar sebagai pelengkap sumber-sumber pembiayaan dalam negeri mampu menciptakan kondisi ekonomi dalam negeri yang mandiri, yang berdaya tahan mengatasi pengaruh ekonomi dunia yang semakin tidak menentu (Arsjad,1992: 63).

Kebijaksanaan keuangan daerah itu sendiri mencakup beberapa aspek (Supriatna, 1993 : 173 ) yaitu:

1. pembiayaan dalam rangka asas dekonsentrasi dan tugas perbantuan.
2. sumber pendapatan asli daerah.
3. pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kemampuan aparatur di daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah.

Keuangan daerah itu sendiri adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangan dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBD.

Berdasarkan asas desentralisasi, semua urusan pemerintah daerah, baik mengenai pengeluaran belanja pegawai dan operasional daerah maupun mengenai proyek-proyek pembangunan daerah harus dibiayai APBD. Bukan berarti bahwa pemerintah daerah harus mempunyai penerimaan asli daerah ( pajak dan retribusi daerah ) yang mencukupi untuk segala pengeluaran tersebut, akan tetapi dapat juga dari penerimaan daerah yang berupa subsidi atau bagi hasil dari pusat. Hanya saja jika pusat memberi subsidi kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas ini, maka subsidi tersebut harus bersifat beban, dimana penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dalam APBD.

Berdasarkan asas dekonsentrasi, pemerintah pusat melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah melalui aparatnya, dalam hal pembiayaan operasional maupun pembangunan proyek-proyek dengan pembiayaan APBN, yang dialokasikan di APBD. Selain itu, berdasarkan asas tugas pembantuan, pemerintah pusat dapat menugaskan daerah untuk melaksanakan tugas yang seharusnya dilaksanakan pemerintah pusat. Demikian pula pemerintah daerah dapat menugaskan pemerintah daerah yang lebih rendah tingkatannya untuk melaksanakan tugas tersebut. Dalam hal ini yang menugaskan menyediakan pembiayaannya dimana pemerintah pusat melalui APBN.

Asas Negara Kesatuan Indonesia menyatakan bahwa daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat. Atas asas ini maka antara keuangan negara/pusat dan keuangan daerah terdapat hubungan yang sangat erat, bukan saja antara tingkatan pemerintah, akan tetapi mencakup pula faktor-faktor strategi pembangunan dan pengawasan terhadap daerah.

Ruang lingkup hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang sifatnya kompleks karena keterkaitan dengan berbagai aspek terutama dampak dari pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat disederhanakan (Supriatna, 1993: 176) sebagai berikut:

3. efisiensi, pajak dan redistribusi daerah harus mendorong efisiensi alokasi sumber-sumber ekonomi, dalam bentuk sedikit mungkin menimbulkan distorsi atau pengaruh terhadap pengambilan keputusan para konsumen dan produsen,
  4. kemampuan administratif, adalah kemampuan untuk melaksanakan berdasarkan kemampuan administratif yang ada. Kemampuan tersebut dapat di identifikasikan dari jumlah pegawai yang ada, keahlian, kejujuran, dan perangkat administrasi yang memadai,
  5. politis, pelaksanaan pajak harus diterima secara politis, pengenaan pajak yang tumpang tindih sedapat mungkin dihindari, sehingga tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat,
  6. dampak positif, bahwa pajak daerah harus memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi daerah, sehingga perlu pertimbangan sebelum menerapkan suatu jenis pajak daerah.
- c. Bagi hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah melalui penetapan bagi hasil. Penetapan bagi hasil menyangkut masalah bagaimana mencari ukuran hasil pungutan pajak-pajak pusat atau pajak-pajak pemerintah pada tingkat yang lebih baik.

Pada saat ini bagi hasil pajak yang terbesar adalah pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana pemerintah pusat memperoleh 10 persen, sedangkan 90 persen lainnya diserahkan pada pemerintah daerah yaitu 10 persen dari 90 persen untuk daerah tingkat I dan sisanya untuk pemerintah daerah tingkat II.

- d. Subsidi dan bantuan Kepada Daerah

Otonomi daerah bukan berarti setiap daerah harus dapat membiayai seluruh kegiatannya dari pendapatan asli daerahnya. Tidak mungkin, bagi sebagian daerah yang hanya mempunyai sedikit potensi didalam pendapatan asli daerah akan kekurangan biaya dengan adanya otonomi daerah, bahkan bagi daerah potensial pun harus membantunya. Dalam hal itu, pemerintah pusat

mempunyai fungsi antara lain melakukan pemerataan antara daerah dengan mengalokasikan dana berupa bantuan dan subsidi yang relatif lebih banyak kepada daerah yang berpendapatan rendah dan kurang berpotensi. Adanya subsidi dan bantuan Pemerintah Pusat merupakan alat yang utama dalam melakukan pemerataan antar wilayah.

Didalam memeratakan tingkat pembangunan tersebut, besarnya subsidi dan bantuan kepada tiap daerah harus didasarkan pada formula yang rasional dan dikaitkan dengan besarnya alokasi sektoral kepada masing-masing daerah. Daerah yang telah menerima alokasi sektoral yang lebih besar akan mendapatkan bantuan dan subsidi yang relatif lebih kecil dibandingkan daerah lainnya. Sebaliknya daerah yang menerima alokasi sektoral lebih kecil perlu dibantu dan diberikan subsidi yang lebih besar.

e. Pinjaman daerah

Pinjaman daerah merupakan aset penerimaan daerah dalam struktur keuangan daerah. Pinjaman daerah dewasa ini semakin memegang posisi penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana daerah, terutama dalam rangka pelayanan umum kepada masyarakat yang semakin meningkat. Selain akan mengurangi ketergantungan pembiayaan daerah atas APBN, juga akan semakin mendewasakan sistem perencanaan anggaran atau keuangan daerah di lingkungan pemerintah daerah secara mantap dan mandiri.

Pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, maka diharapkan pemerintah daerah akan dapat menentukan sendiri kegiatan atau proyek-proyek yang benar-benar diperlukan masyarakat dan yang akan menghasilkan pendapatan untuk membayar kembali pinjaman tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah terbagi antara beberapa satuan yang terpisah (Devas, 1989:283) yaitu:

1. sekretaris wilayah daerah bertanggung jawab pada Kepala Daerah dalam hal menyiapkan anggaran tahunan, menyetujui dan mengendalikan pengeluaran, dan membuat catatan keuangan dan membukukannya;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertugas menyusun kebijaksanaan dan program dalam kaitannya dengan anggaran pembangunan tahunan;
3. dalam lingkungan Sekretariat ada bagian Pembangunan yang bertugas sebagai koordinator proyek-proyek yang dibiayai dari anggaran pembangunan daerah dan proyek-proyek yang dibiayai dengan bantuan dari pemerintah pusat;
4. dinas Pendapatan daerah bertanggung jawab langsung pada kepada daerah dan bertugas memungut berbagai pajak dan restribusi daerah, biaya surat ijin dan kutipan lain-lain;
5. menerima, mengawasi dan mengeluarkan uang, menerbitkan cek atas nama pemerintah daerah adalah tugas kantor pembendaharaan;
6. masing-masing pemerintah daerah memiliki inspektorat yang tugasnya mencakup memeriksa keuangan daerah.

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah diduga terdapat pengaruh timbal balik antara pengeluaran daerah yang dibiayai dari penerimaan rutin dan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi di kota Kediri tahun 1990 -- 2000.



### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode explanatori yaitu menganalisis pengaruh dan kausalitas antara variabel satu dengan lainnya.

##### 3.1.2 Unit Penelitian

Unit penelitian ini adalah sumber pengeluaran daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Kediri dengan memperhatikan penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah tersebut.

##### 3.1.3 Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah APBD dan seluruh sektor ekonomi yang ada di kota Kediri. Untuk keperluan penelitian ini hanya diambil APBD dan aktivitas sektor ekonomi yang ada pada tahun 1990 – 2000, pilihan tahun analisis ini dengan alasan : 1) dalam periode tersebut ada dua karakter ekonomi besar yaitu krisis dan keadaan normal; 2) adanya Undang-undang otonomi daerah.

#### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu berupa data sekunder dalam runtun waktu (*time series*) yang bersifat kuantitatif yang diperoleh di BPS Kota Kediri dengan bersumber pada Kediri dalam angka tahun 1990 – 2000 dan Dinas kantor Keuangan daerah dari tahun 1990 – 2000 serta studi literatur yang sesuai dengan penelitian ini. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kuartalan tahun 1990 – 2000.

Pada umumnya data yang tersedia tidak dalam bentuk kuartalan sehingga diubah menjadi data kuartalan dengan metode interpolasi linier Insukindro (Insukindro, 1992. 122) sebagai berikut:

$$Q_1 = 1/4 \{ Y_t - 4,5 / 12 ( Y_t - Y_{t-1}) \}$$

$$Q_2 = 1/4 \{ Y_t - 1,5 / 12 ( Y_t - Y_{t-1}) \}$$

$$Q_3 = 1/4 \{ Y_t + 1,5 / 12 ( Y_t - Y_{t-1}) \}$$

$$Q_4 = 1/4 \{ Y_t + 4,5 / 12 ( Y_t - Y_{t-1}) \}$$

Dimana:

$Q_1, Q_2, Q_3, Q_4$  = data kuartal pada tahun ke t

$Y$  = data tahun t

### 3.3 Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel pertumbuhan pengeluaran daerah (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan) dan pertumbuhan ekonomi .

1. Pertumbuhan pertumbuhan pengeluaran daerah (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan) dihitung dengan rumus sebagai berikut (Jinghan, 1990: 21):

$$X_t = \frac{X_t - (X_t - 1)}{X_t - 1} \times 100 \%$$

Keterangan:

$X_t$  = Pertumbuhan pengeluaran pemerintah Kota Kediri tahun t

$X_t$  = pengeluaran pemerintah Kota Kediri tahun t

2. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan rumus sebagai berikut ( Suseno,1991 35):

$$Y_t = \frac{Y_t - (Y_t - 1)}{Y_t - 1} \times 100 \%$$

Keterangan :

$Y_t$  = Pertumbuhan ekonomi tahun t

$Y_t$  = PDRB tahun t

### 3.3.1 Uji Kausalitas Granger

Untuk menguji hipotesis mengenai ada tidaknya pengaruh timbal balik sumber pengeluaran daerah Kediri dan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri digunakan uji Kausalitas yang digunakan Granger yang dirumuskan sebagai berikut (Arief, 1993: 152):

$$X_t = \sum_{i=1}^m a_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^n b_j Y_{t-j} + u_t$$

$$Y_t = \sum_{i=1}^m c_i Y_{t-i} + \sum_{j=1}^s d_j X_{t-j} + v_t$$

Keterangan :

$Y_t$  = Pertumbuhan ekonomi tahun t

$X_t$  = Pertumbuhan pengeluaran pemerintah Kota Kediri ( pengeluaran rutin dan pembangunan) tahun t

m,n,r,s = time lag yang ditentukan secara arbiter

$a_i$  = koefisien regresi dari X pada X = f(Y)

$b_j$  = koefisien regresi dari Y pada X = f(Y)

$c_i$  = koefisien regresi dari Y pada Y = f(X)

$d_j$  = koefisien regresi dari X pada Y = f(X)

t = periode waktu (10 tahun)

$u_t, v_t$  = error terms yang diasumsikan tidak mengandung kolerasi serial

Hasil-hasil regresi kedua bentuk model regresi linear ini akan menghasilkan empat kemungkinan mengenai nilai koefisien-koefisien regresi masing-masing:

1. Jika  $\sum_{j=1}^n b_j \neq 0$  dan  $\sum_{j=1}^s d_j = 0$ , maka terdapat kausalitas satu arah dari Y ke X

2. Jika  $\sum_{j=1}^n b_j = 0$  dan  $\sum_{j=1}^s d_j \neq 0$ , maka terdapat kausalitas satu arah dari X ke Y
3. Jika  $\sum_{j=1}^n b_j = 0$  dan  $\sum_{j=1}^s d_j = 0$ , maka X ke Y bebas antara satu dengan yang lain
4. Jika  $\sum_{j=1}^n b_j \neq 0$  dan  $\sum_{j=1}^s d_j \neq 0$ , maka terdapat kausalitas dua arah antara Y ke X

### 3.3.2 Model Regresi Distributed lag

Untuk mengetahui ketergantungan variabel *dependent* yaitu Y (pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel *independent* yaitu X (pengeluaran pemerintah Kota Kediri) jarang terjadi seketika itu juga. Seringkali reaksi Y terhadap pengaruh X memerlukan waktu. Waktu yang diperlukan untuk timbulnya reaksi atau jawaban terhadap suatu aksi atau pengaruh disebut beda kala atau lag.

Maka untuk mengetahui ketergantungan digunakan model regresi distributed lag sebagai berikut (Supranto, 1995 : 176):

$$Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \beta_3 X_{t-3} + \beta_4 X_{t-4} + \epsilon_t \quad (1)$$

$$B_i = A_0 + A_1 i + A_2 i^2 \quad (2)$$

Kemudian di substitusikan dari (2) ke dalam (1)

$$\begin{aligned} Y_t &= A + \sum_{i=0}^4 (A_0 + A_1 i + A_2 i^2) X_{t-i} + \epsilon_t \\ &= A + A_0 \sum_{i=0}^4 X_{t-i} + A_1 \sum_{i=0}^4 i X_{t-i} + A_2 \sum_{i=0}^4 i^2 X_{t-i} + \epsilon_t \end{aligned}$$

$$Y_t = A + A_0 Z_{0t} + A_1 Z_{1t} + A_2 Z_{2t} + \epsilon_t$$

$$\text{di mana: } Z_{0t} = \sum_{i=0}^3 X_{t-i} = (X_t + X_{t-1} + X_{t-2} + X_{t-3} + X_{t-4})$$

$$Z_{1t} = \sum_{i=0}^3 i X_{t-i} = (X_{t-1} + 2X_{t-2} + 3X_{t-3} + 4X_{t-4})$$

$$Z_{2t} = \sum_{i=0}^3 i^2 X_{t-i} = (X_{t-1} + 4X_{t-2} + 9X_{t-3} + 16X_{t-4})$$

Keterangan:

$Y_t$  = pertumbuhan ekonomi

$\alpha$  = konstan

$\beta_0$  = koefisien regresi dari pengeluaran Daerah

$B_1$  = polinomial kuadrat (pangkat 2)

Variabel  $X_{t-1}, X_{t-2}, X_{t-3}$  adalah beda kala (  $k = 3$  )

Dari persamaan regresi diatas selanjutnya diadakan uji statistik dan uji ekonometrik sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara parsial dari variabel bebas diatas yang signifikan mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi yang merupakan uji terhadap koefisien regresi secara individual dengan rumus (Arief, 1993: 9):

$$t_{hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Dimana

$b_i$  = koefisien regresi

$S_{b_i}$  = standart error

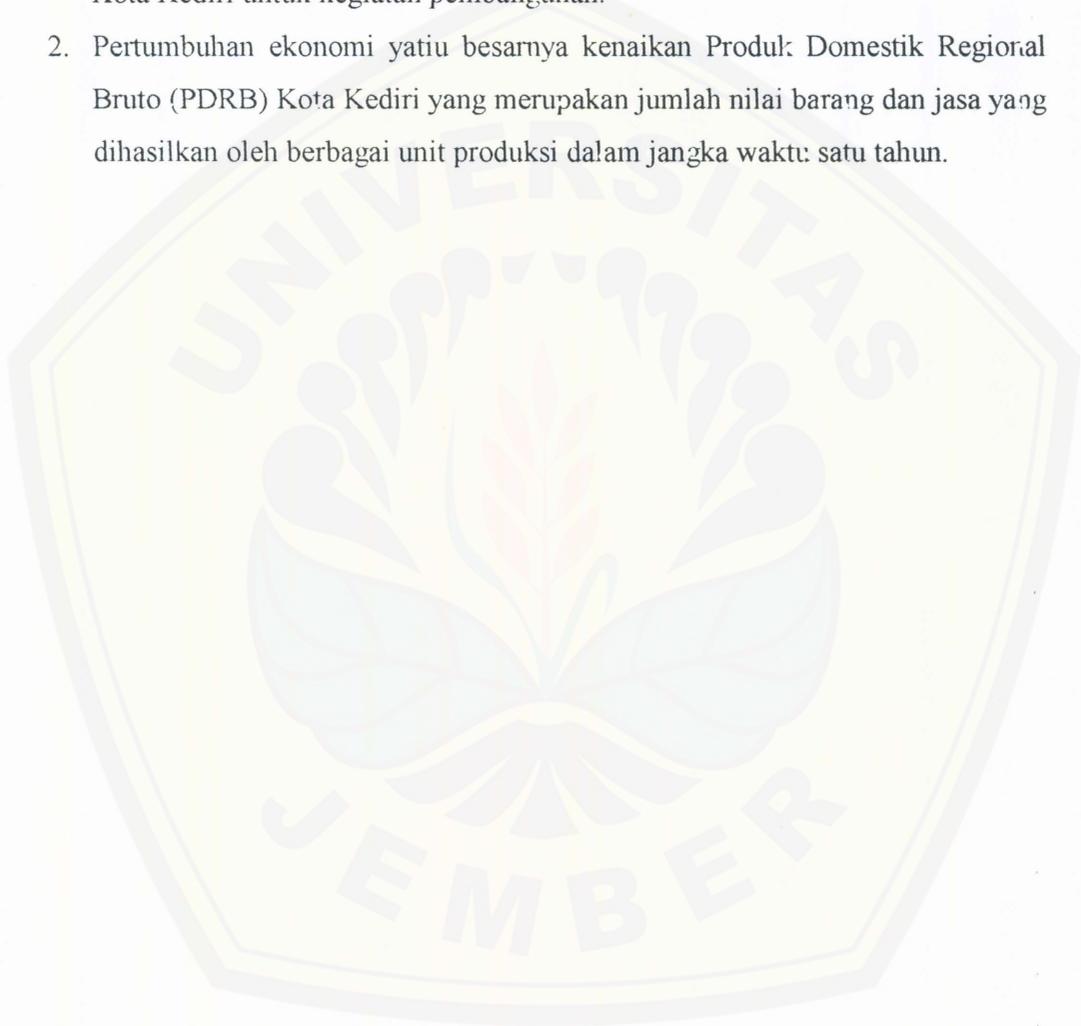
Kriteria Pengujian untuk uji dua arah dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% sebagai berikut:

- a. Apabila probabilitas t hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan yang telah ditetapkan / *level of significance* ( $\alpha$ ), artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat
- b. Apabila probabilitas t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan yang telah ditetapkan / *level of significance* ( $\alpha$ ), artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat

### 3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Untuk mendapatkan pemahaman yang sama maka diberikan definisi variabel operasional sebagai berikut :

1. Pengeluaran Pemerintah adalah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kediri untuk kegiatan pembangunan.
2. Pertumbuhan ekonomi yaitu besarnya kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri yang merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam jangka waktu satu tahun.





## IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Luas wilayah kota Kediri adalah 6.340 ha yang terdiri dari kecamatan Mojoroto seluas 2.460 ha, kecamatan Kota seluas 1.490 ha, dan kecamatan Pesantren seluas 2.390 ha. Wilayah kota Kediri terletak pada ketinggian 67 m dpl dengan keadaan topografi relatif datar diantara kelerengan 0 – 40 %.

Secara administrasi kota Kediri termasuk dalam wilayah kerja Propinsi Jawa Timur yang membawahi 3 wilayah kecamatan, 8 kelurahan, 38 desa, 193 RW, dan 1329 RT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara adalah kecamatan Gampengrejo kabupaten Kediri
- Sebelah selatan adalah kecamatan Ngadiwuluh dan Kandat kabupaten Kediri
- Sebelah timur adalah kecamatan Wates dan Gurah kabupaten Kediri
- Sebelah barat adalah kecamatan Grogol dan Semen kabupaten Kediri

Tabel 1: Karakteristik Tanah dan Iklim di Wilayah Kota Kediri

No Kec.	Tinggi Tempat (m,dpl)	Kemiringan (%)	Jenis tanah	Curah Hujan		PH Tanah	Lap. Olah (Cm)
				BB	BK		
1. Mojoroto	67	0 - 40	Aluvial,Regosol Lithosol	6	6	5,5 - 7	20-40
2. Kota	67	0 - 2	Aluvial,Regosol Lithosol	5	7	4,4 - 6	20-40
3. Pesantren	67	0 - 2	Aluvial,Regosol Lithosol	7	5	6 - 7	20-40

Keterangan:

BB: Bulan Basah

BK: Bulan Kering

Luas lahan di wilayah kota Kediri tercatat 6.340 ha, yang digunakan untuk pekarangan beserta bangunan 36,26 %, persawahan 38,75 %, tegal 8,23 %, hutan 5,53 % dan untuk lain-lain sebesar 11,23 %. Untuk data selengkapnya dituangkan dalam tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2 Daftar Luas lahan menurut penggunaannya di wilayah kota Kediri.

No.Jenis penggunaan	Luas tiap kecamatan (ha)			Jumlah
	Mojooroto	Kota	Pesantren	
1. Perkarangan perumahan/ bangunan	703.133	758.605	792.452	2.254.190
2. Tegall	144.500	75.642	301.458	521.600
3. Perkebunan	-	-	-	-
4. Hutan	350.360	-	-	350.360
5. Sawah	786.900	433.000	1.235.644	2.455.544
6. Lain-lain	475.107	222.753	60.446	758.306
<b>Jumlah</b>	<b>2.460.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>6.340.000</b>

Sumber: Pola dasar pembangunan daerah kota Kediri Tahun 2000 – 2005

Keragaman sumber daya manusia di wilayah kota Kediri yang terdiri dari: jumlah penduduk, dan mata pencaharian. Jumlah penduduk di wilayah kota Kediri pada tahun 1990 – 2000 rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama tahun 1990 – 2000 jumlah penduduk mengalami penurunan pada tahun 1992 sebanyak 229.573 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 112.784 jiwa dan perempuan sebanyak 116.789 jiwa. Untuk data yang lebih rinci tentang Jumlah Penduduk dan Mata pencaharian dapat lihat tabel 3 dan 4 di bawah ini.

Tabel 3: Perkembangan Penduduk hasil Registrasi tahun 1990 - 2000

Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah
	laki-laki	Perempuan	
1990	113.518	117.350	230.868
1991	112.974	117.125	230.099
1992	112.784	116.789	229.573
1993	113.942	118.005	231.947
1994	114.674	118.635	233.309
1995	115.124	119.321	234.445
1996	115.462	119.574	235.036
1997	115.616	119.998	235.614
1998	116.055	120.252	236.307
1999	116.135	120.440	236.575
2000	117.192	121.344	238.536

Sumber : BAPPEDA Kota Kediri Tahun 2000

Tabel 4 : Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian di Wilayah kota Kediri

No.	Mata Pencaharian	Jumlah penduduk (jiwa)
1.	Petani	4.620
2.	Pertambangan dan Penggalian	304
3.	Industri Pengolahan	30.488
4.	Listrik, Gas, dan Air Minum	537
5.	Bangunan	4.540
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	27.960
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	7.944
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahann	2.408
9.	Jasa-jasa lain	34.727
	Jumlah	238.536

Sumber: BAPPEDA Kota Kediri Tahun 2000

Kota Kediri identik dengan kota rokok kretek. Di kota tersebut, pabrik rokok kretek PT Gudang Garam berdiri dan berkembang. Dengan areal seluas 250 hektar, pabrik rokok itu mempekerjakan sekitar 40.000 karyawan dan buruh. Ini berarti kehidupan hampir 17 persen penduduk kota Kediri tergantung pada penghasilan kerja di PT. Gudang Garam. Implikasi dari fakta ini sangat besar. Misalnya terjadi pemogokan., perekonomian Kota Kediri akan terganggu. Sekedar contoh, setiap hari karyawan/buruh Gudang Garam menghabiskan Rp 2000 untuk makan. Apabila pabrik tutup sehari, omzet penjualan yang hilang dari pedagang makanan saja mencapai Rp 80 Juta.

Pertumbuhan ekonomi kota Kediri di pengaruhi salah satunya adalah sumber pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dan tingkat PDRB yang tinggi kota Kediri yang bersangkutan.

#### 4.1.1 Pengeluaran Rutin Pemerintah Kota Kediri

Sisi pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi Pengeluaran rutin dan Pengeluaran pembangunan. Anggaran pengeluaran rutin kota Kediri meliputi pengeluaran untuk belanja pegawai, barang, biaya

pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, angsuran pinjaman/hutang dan bunga, ganjaran/subsidi/sumbangan, pensiun/bantuan dan onderstand, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tidak tersangka.

Belanja pegawai meliputi pengeluaran gaji dan pensiun, tunjangan beras, uang makan/laukpauk dan lainnya. Perhatian dan perbaikan pengeluaran atau belanja pegawai, pada satu pihak dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah dan di lain pihak dengan memperhatikan penghematan dan ukuran efisien yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta penyempurnaan pelaksanaan program-program pembangunan.

Belanja barang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari seperti pembelian alat tulis kantor atau departemen dan sekolah-sekolah. Belanja barang meningkat sesuai dengan peningkatan kegiatan rutin yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.

Biaya pemeliharaan dimanfaatkan untuk pemeliharaan agar milik atau kekayaan pemerintah yaitu barang-barang kapital tetap seperti gedung, kendaraan dan lain-lain dapat terpelihara secara baik.

Belanja perjalanan dinas dipakai untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah dalam menunjang program pemerintah seperti biaya akomodasi atau penginapan, biaya transportasi dan lain-lain.

Ganjaran/subsidi/sumbangan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah untuk membantu pengembangan otonomi daerah tersebut. Dalam hal ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah daerah di bawahnya. Bagian anggaran ini sebagian terbesar terdiri atas gaji dan tunjangan pegawai daerah otonomi. Pertimbangan tentang fungsi belanja pegawai dalam negeri dan luar negeri berlaku untuk dipertimbangkan. Perhatian pemerintah dalam bagian ini terarah pada guru, tenaga medis, gaji lurah dan pamong desa serta lain-lain.

Angsuran pinjaman/hutang dan bunga adalah pengeluaran yang mengikat sesuai dengan persetujuan pinjaman yang telah disepakati. Pengeluaran bagian ini nampak semakin meningkat selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 1996 - 2000. Hal

ini karena tahun-tahun tersebut merupakan masa jatuh tempo pinjaman-pinjaman tersebut untuk diangsur dan dibayar bunganya setelah melewati masa tenggang waktu (*grace period*) yang ditentukan. Walaupun pembayarannya mengikat, namun jumlah dan jadwalnya telah diperhitungkan berdasarkan kemampuan menyediakan devisa.

Subsidi seperti subsidi BBM, kebutuhan pangan dimaksudkan sebagai stabilitas harga kebutuhan bahan pokok sangat diperlukan. Subsidi mulai ada di Kota Kediri tahun 1997 dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mengikuti kenaikan harga jual BBM. Hal ini berarti bahwa upaya menciptakan tabungan pemerintah untuk membiayai program pembangunan akan berkurang. Kebijakan pada tahun anggaran berikutnya adalah menekan pengeluaran ini melalui upaya efisiensi dalam pengadaan BBM, tanpa menaikkan atau menurunkan harga jualnya. Berdasarkan APBD Kota Kediri, maka realisasi pengeluaran rutin tahun 1990 - 2000 dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Secara keseluruhan anggaran pengeluaran kota Kediri tahun 1990 – 2000 menunjukkan lebih besar daripada pengeluaran pembangunan, tapi selama tahun anggaran tersebut terdapat beberapa tahun dimana jumlah pengeluaran rutin lebih kecil daripada pengeluaran pembangunan. Peningkatan anggaran pengeluaran rutin tahun 1990 – 2000 disebabkan oleh meningkatnya anggaran setiap sektor pengeluaran rutin. Anggaran belanja pegawai mengalami kenaikan rata-rata sebesar 32%. Khususnya untuk submata anggaran gaji, upah dan pensiun terjadi kenaikan yang sangat tinggi dari Rp 6.083 juta menjadi Rp 17.089 juta (180 %) pada tahun 1998 dan sebesar Rp 25.877 juta (51 %) tahun 1999 bagi bidang pendidikan dan medis. Akibatnya, submata anggaran lainnya seperti belanja barang, pemeliharaan dan lain-lain sama meningkatnya sesuai dengan kebutuhan untuk memberikan pelayanan masyarakat dan pengamanan hasil pembangunan tanpa mengabaikan penghematan. Untuk setiap tahunnya anggaran pengeluaran belanja dan belanja lain-lain masing-masing 20 % dan 18 % dari anggaran yang ada

Tabel 5: REALISASI PENGELUARAN RUTIN PEMERINTAH KOTA KEDIRI TAHUN 1990 - 2000

PENGELUARAN RUTIN	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Belanja pegawai	1.926.041	1.916.042	2.404.792	2.920.403	3.193.057	3.653.631	4.207.662	6.083.268	17.089.940	25.877.220	23.799.302
2. Belanja barang	885.694	838.425	971.100	810.235	836.348	1.113.969	1.455.118	1.460.470	4.808.747	4.355.945	5.475.202
3. Biaya pemeliharaan	348.226	347.383	467.386	463.326	542.598	386.712	429.635	435.114	662.495	944.119	566.718
4. Belanja Perjalanan Dinas	52.11	43.836	71.371	76.280	79.006	89.521	146.430	140.230	320.706	364.390	406.436
5. Belanja Lain - lain	752.261	806.479	672.428	1.312.430	1.414.456	2.035.666	1.679.836	1.907.747	2.127.024	3.914.313	3.381.484
6. Angsuran Pinjaman / Hutang dan bunga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.042	102.306
7. Ganjaran/ Sumbasidi/ Sumbangan	0	0	0	0	0	0	0	35.000	101.120	227.520	690.301
8. Pensiunan/ Bantuan dan onderstand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	12.269	121.166	133.969	172.606	254.153	270.941	335.131	508.449	467.546	2.175.943	2.812.574
10. Pengeluaran tidak disangka	0	0	19.440	0	0	0	5.500	8.000	7.158	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>3.976.601</b>	<b>4.073.331</b>	<b>4.740.486</b>	<b>5.755.280</b>	<b>6.319.618</b>	<b>7.550.540</b>	<b>8.259.312</b>	<b>10.508.278</b>	<b>25.584.736</b>	<b>38.000.492</b>	<b>37.234.323</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri

Anggaran pinjaman/hutang dan bunga, yang selama tahun 1990-2000 menunjukkan realisasi yang ada mulai tahun 1999 sebesar Rp 141 juta, karena pada tahun tersebut jatuh tempo untuk membayar angsuran pinjaman/hutang dan bunga dan tahun 2000 jumlah angsuran pinjaman/hutang dan bunga menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 102 juta.

Anggaran untuk subsidi terrealisasi pada tahun 1997 dan mengalami peningkatan pada tahun 1998 dari Rp 35 juta menjadi Rp 101 juta (188.91 %), akibat adanya krisis ekonomi yang berdampak pada naiknya harga-harga kebutuhan bahan pokok. Subsidi diberikan oleh pemerintah kota Kediri dalam rangka menjaga kestabilan harga kebutuhan bahan pokok dan untuk membantu masyarakat pra sejahtera yang ada di Kediri dengan mengadakan antara lain: pertama, Operasi Pasar Terbuka (OPK) yaitu menjual beras di bawah harga pasar yang dilakukan oleh pemerintah kota Kediri bekerja sama dengan Bulog kota Kediri. Kedua, dibidang kesehatan memberikan pelayanan gratis dan menjual obat dengan harga yang terjangkau masyarakat pra sejahtera pada puskesmas-puskesmas yang ditunjuk oleh pemerintah kota Kediri.

Pada tahun 1999 pengeluaran untuk subsidi/bantuan pembangunan kepada daerah bawahan untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah yang berasal dari pajak dan restribusi sebesar 8,27 % dari total pengeluaran pembangunan yang ditetapkan.

Untuk pengeluaran yang tidak mengikat seperti pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain meningkat setiap tahunnya untuk kebutuhan diluar anggaran pengeluaran rutin yang ada. Pada tahun 1990 sebesar Rp 12 juta dan tahun 2000 meningkat menjadi sekitar Rp 2 milyar untuk biaya bantuan-bantuan sosial dan bencana alam. Pengeluaran tidak tersangka anggaran pengeluarannya tidak setiap tahun ada, hal ini karena disesuaikan dengan kebutuhan kota Kediri.

Secara menyeluruh, pengeluaran rutin tahun 1990 – 2000 meningkat walaupun di beberapa submata anggaran masih ada penghematan-penghematan.

#### 4.1.2 Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Kota Kediri

Pengeluaran pembangunan merupakan wahana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan untuk meningkatkan kemakmuran secara merata dan serasi antar desa dan golongan yang dilaksanakan melalui bidang ekonomi. Prioritas diberikan kepada sektor-sektor yang merangsang dan menimbulkan dampak kegiatan ekonomi secara lebih luas dan intensif. Kriteria ini sekaligus memperluas lapangan dan kesempatan kerja.

Perkembangan dari kegiatan pembangunan yang sudah ada dan berdasarkan hasil pembangunan sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi harus tetap diupayakan dengan mengandalkan peningkatan efisiensi dan produktivitas yang perwujudannya dilandaskan pada peran aktif masyarakat yang dijiwai oleh semangat kemitraan dalam berusaha. Sehubungan dengan itu, arah kebijaksanaan pembangunan dilakukan melalui delapan belas sektor pembangunan di bidang ekonomi antara lain :

1. sektor pertanian dan pengairan

Pembangunan sektor pertanian adalah seluruh upaya untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan, sumber daya manusia, modal serta iptek untuk menghasilkan produksi pertanian dan bahan baku primer industri. Kebijaksanaan sektor pertanian antara lain, meliputi peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani; peningkatan produktivitas tenaga kerja pertanian dan kesempatan kerja di pedesaan; peningkatan hasil pertanian dan pengentasan kemiskinan masyarakat petani kota Kediri.

2. sektor industri

Industrialisasi pada sektor industri pada hakekatnya adalah pembangunan suatu sistem yang mempunyai daya hidup dan mampu berkembang secara mandiri serta mengakar pada struktur ekonomi dan struktur masyarakat. Industri adalah tempat terpadunya unsur teknologi dan unsur ekonomi. Industri yang kuat dan maju hanya akan terwujud bila dilandaskan kemampuan teknologi yang kuat serta sistem ekonomi yang andal. Kebijaksanaan sektor industri antara lain, meliputi pengembangan industri dengan nilai tambah yang tinggi dan jangkauan strategis, makin memperdalam struktur industri secara efisien dan mampu bersaing,

pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah serta penyebaran lokasi industri dengan pengembangan prioritas industri yang ada di kota Kediri .

### 3. sektor pertambangan dan energi

Pembangunan pertambangan pada hakekatnya merupakan upaya pengembangan sumber daya alam yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Kebijakan sektor pertambangan antara lain, meliputi pengolahan usaha pertambangan secara efisien dan efektif, penyelenggaraan secara terpadu antar masyarakat, pemerintah dan badan usaha, peningkatan produksi, melindungi, membimbing, dan meningkatkan pengelolaan pertambangan rakyat yaitu pertambangan pasir dan batu kali sesuai dengan ketentuan peraturan yang.

Kebijakan sektor energi antara lain, meliputi pengendalian laju pertumbuhan pemakaian energi, serta penghematan penggunaan bahan bakar minyak dan mengurangi penggunaan sumber energi yang membawa dampak kerusakan lingkungan alam.

### 4. sektor perhubungan dan pariwisata

Sektor transportasi dalam fungsinya melayani mobilitas orang, barang, dan jasa baik lokal, regional, nasional serta peranannya sebagai pendukung pembangunan sektor lainnya, pembangunan transportasi merupakan unsur vital sebagai urat nadi dalam kehidupan daerah dan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan. Kebijakan sektor transportasi antara lain, meliputi penataan dan penyempurnaan sistem transportasi jalan raya, dan kereta api.

### 5. sektor perdagangan dan koperasi

Pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan daerah. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Kebijakan sektor perdagangan antara lain, meliputi penyesuaian penyediaan kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat dengan pola produksi dan konsumsi masyarakat, peningkatan daya saing.

Penerobosan dan peluasan pasar luar daerah, serta mendorong pengusaha kecil dalam suasana kemitraan dengan pengusaha besar dan menengah.

#### 6. sektor tenaga kerja dan transmigrasi

Setiap upaya pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja sehingga setiap warga masyarakat dapat memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan sektor tenaga kerja antara lain, meliputi pengembangan perlindungan tenaga kerja secara terpadu dan bertahap, pemantapan sistem upah yang tidak menimbulkan kesenjangan sosial, serta penggunaan tenaga kerja asing secara selektif.

Kebijakan sektor transmigrasi antara lain, meliputi penyediaan lahan yang memadai dan layak bagi usaha produktif dan bagi kehidupan transmigrasi, serta peningkatan penyuluhan, penerangan, pelayanan, dan pengembangan daerah penerima.

#### 7. sektor pembangunan daerah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Kebijakan sektor pembangunan daerah antara lain, meliputi peningkatan kerjasama antar daerah dan kemampuan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, peningkatan peran serta masyarakat dan kemampuan manajemen pembangunan seluruh aparatur pemerintah daerah, peningkatan pengembangan desa swadaya dan desa swakarsa menuju perkotaan yang efisien, dan penciptaan lingkungan yang sehat, rapi, aman, dan nyaman, melanjutkan penataan penguasaan dan penggunaan tanah, penataan kembali batas daerah, peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan pertumbuhan keserasian ekonomi antar desa.

#### 8. sektor agama

Sektor agama diarahkan agar mampu meningkatkan kualitas umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga tercipta suasana kehidupan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang penuh keimanan melalui peningkatan jumlah tempat

ibadah, peningkatan jumlah jamaah haji, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan keagamaan misalnya memperingati hari besar keagamaan.

9. sektor pendidikan generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Pendidikan nasional bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, sehat jasmani dan rohani. Kebijakan sektor pendidikan dan kebudayaan antara lain, meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan luar sekolah, pengembangan kurikulum dan pembinaan guru, pembinaan nilai-nilai kebudayaan, dan kesenian tradisional.

10. sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, kependudukan, dan keluarga berencana

Pembangunan kesehatan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dalam setiap tahap kehidupan tersebut, sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dihadapi. Pembangunan kesehatan juga berperan penting dalam membangun manusia sebagai sumber daya pembangunan. Derajat kesehatan yang tinggi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas akan mempertajam kemampuan daya saing bangsa dalam dunia yang makin ketat persaingannya.

11. sektor perumahan dan pemukiman

Kebijakan sektor perumahan dan pemukiman antara lain, meliputi penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pemukiman yang terjangkau oleh masyarakat luas, penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan dan yang berkelanjutan, peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan dan pemukiman, pengembangan sistem pendanaan perumahan dan pemukiman, pemantapan kelembagaan dan pola pengelolaan pembangunan perumahan dan pemukiman secara terpadu, serta pengembangan perangkat peraturan pendukung.

#### 12. sektor hukum

Sasaran sektor hukum menuju terbentuk serta berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian hukum, ketaatan hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional yang didukung oleh aparatur hukum, sarana, dan prasarana yang memadai, serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

#### 13. sektor pertahanan dan keamanan

Pembangunan pertahanan dan keamanan diarahkan pada kemampuan untuk mewujudkan daya tangkal daerah yang tangguh dalam sishamkamrata, yang didukung oleh antara lain, oleh manusia yang profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara yang tinggi, kemanunggalan TNI- rakyat dan pelaksanaan fungsi sosial politik TNI yang mantap dan dinamis, serta didukung pula oleh sarana prasarana dan industri strategi yang andal sesuai dengan kemajuan iptek agar terjamin stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis, kelangsungan pembangunan nasional.

#### 14. sektor penerangan, pers dan komunikasi sosial

Pembangunan penerangan, komunikasi, dan media massa ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar informasi, yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi yang mendukung pelaksanaan pembangunan, dan terciptanya interaksi terbuka yang bertanggung jawab antarmasyarakat serta antara masyarakat dan pemerintah dalam proses komunikasi, serta meningkatnya peran serta aktif dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

#### 15. sektor ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian

Kebijaksanaan pembanguan Iptek merupakan kebijaksanaan yang digariskan guna meningkatkan kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai Iptek yang dilaksanakan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan alih teknologi melalui perubahan dan pembaharuan teknologi yang didukung oleh pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasana, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan mutu pendidikan sehingga

mampu mendukung upaya penguatan, pendalaman, dan perluasan Iptek dalam rangka menunjang proses industrialisasi menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.

#### 16. sektor aparatur pemerintah

Pembangunan aparatur pemerintah daerah pada hal ikatnya merupakan upaya penyempurnaan, pendayagunaan, dan pembinaan keseluruhan unsur sistem administrasi daerah yang pada pokoknya meliputi penataan organisasi, pemyempurnaan ketatalaksanaan, pemantapan sistem manajemen, perbaikan sarana dan prasana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraannya sehingga memiliki disiplin, kemampuan profesional, wawasan pembangunan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air.

Kebijaksanaan sektor aparatur pemerintah antara lain, peningkatan pelaksanaan fungsi lembaga tertinggi, pemantapan sistem pengawasan keuangan daerah dan pembangunan secara terpadu dan konsisten, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang semakin efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat, peningkatan dan pengembangan pelaksanaan fungsi dan peranan aparatur pemerintah desa dan kelurahan, serta pengembangan secara terpadu dan efisien sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran.

#### 17. sektor pengembangan dunia usaha

Dunia usaha daerah yang terdiri atas koperasi, usaha pemerintah, dan usaha swasta akan makin kokoh dan menjadi kekuatan ekonomi daerah yang makin tangguh melalui penciptaan iklim usaha dan pola perdagangan yang sehat, dengan menyuburkan semangat dan kreativitas usaha serta mendorong peran serta, sfisien, produktivitas dan daya saing, serta meningkatkan pemerataan memberantas kemiskinan. Kebijakan sektor pengembangan dunia usaha antara lain, meliputi pembinaan usaha daerah, pencegahan penguasaan dan pemusatan kekuatan ekonomi yang merugikan masyarakat, pengembangan kemampuan dan peranan usaha kecil, serta pembinaan usaha informal dan tradisional menjadi unsur kekuatan ekonomi yang andal, mandiri, dan maju.

#### 18. sektor sumber alam dan lingkungan hidup

kebijaksanaan sektor lingkungan hidup mengarah pada pembangunan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan kawasan hutan daerah, peningkatan upaya pengendalian pencemaran, serta pengembangan pola tata ruang dan peningkatan kerjasama daerah bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Dengan pendekatan sektoral diharapkan pelaksanaan fungsi pertumbuhan akan mencapai dua sasaran pokok, yaitu: pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui penguat struktur ekonomi; dan kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang mampu menjamin terjadinya pemerataan antar daerah dan desa (Badjuri, 1999:82). Realisasi pengeluaran pembangunan tahun 1990 – 2000 Kota Kediri dapat dilihat pada tabel 6.

Realisasi pengeluaran pembangunan Kota Kediri tahun 1990 – 2000 merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemakmuran secara merata dan serasi yang dilakukan melalui bidang ekonomi. Prioritas pengeluaran pembangunan kota Kediri tahun 1990 – 2000 adalah sektor perhubungan dan pariwisata, sektor pembangunan daerah, dan sektor pendidikan generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan kepada Tuhan YME dari pada sektor-sektor lainnya. Pada ketiga sektor tersebut pengeluarannya cukup tinggi pada tahun 1990 rata-rata sebesar 48,5 %; 10,91 %; dan 29,8 %.

Pengeluaran sektor perhubungan cukup tinggi pada tahun 1990-2000 rata-rata sebesar dua sampai tiga milyar yang di anggarkan untuk membiayai proyek-proyek sarana dan prasarana jalan raya yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Kota Kediri merupakan kota penghubung antar wilayah yang dilewati oleh jalur kendaraan dan kereta api serta untuk menperlancar distribusi barang kebutuhan pokok dari desa ke kota.

Pengeluaran sektor pembangunan daerah rata-rata sebesar 1 milyar untuk tiap tahunnya dan pengeluaran tertinggi pada tahun 1999 sebesar 2 milyar digunakan sebagian besar berupa pembangunan di desa-desa seperti jalan-jalan desa, jembatan, saluran air yang merupakan proyek-proyek yang diutamakan lewat

Tabel 6 : REALISASI PENGELUARAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI TAHUN 1990 - 2000

PENGELUARAN PEMBANGUNAN	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Pertanian dan Pengairan	21.266	750	31.000	1.000	2.000	37.000	170.000	91.515	126.120	651.750	1.379.616
2. Industri	4.000	3.000	9.000	16.149	12.335	27.000	49.090	60.500	42.000	16.000	10.000
3. Pertambangan dan Energi	12.500	0	15.052	2.077	4.970	0	110.300	74.272	20.000	0	0
4. Perhubungan dan Wisata	2.011.362	1.930.965	4.169.698	2.415.912	1.604.028	1.465.420	1.011.793	1.812.979	2.589.612	4.176.075	3.642.484
5. Perdagangan dan Koperrasi	1.000	1000	1.000	500	230.626	420.591	295.800	328.589	410.703	585.664	662.429
6. Tenaga kerja Dan Transmigrasi	4.251	735	8.635	615	26.000	32.500	8.000	6.000	6.500	0	0
7. Pembangunan Daerah	455.611	408.002	544.431	1.161.423	2.430.073	1.962.444	1.695.552	1.915.480	1.825.630	2.421.778	1.059.382
8. Agama	0	0	17.485	9.991	15.000	37.250	23.500	40.250	30.000	50.000	30.000
9. Pendidikan dan Generasi Muda, Kebudayaan Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1.245.266	1.143.907	1.422.452	1.073.803	651.046	561.515	615.591	812.761	978.612	2.554.455	1.219.036
10. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana ( KB )	102.554	124.798	58.316	97.383	383.154	200.733	238.261	257.816	203.194	286.267	500.791
11. Perumahan rakyat dan Pemukiman	0	0	77.130	490.29	3.500	3.500	73.500	981.892	1.669.963	1.235.891	5.639.736
12. Hukum	4.500	3.500	7.250	3.500	7.000	9.000	22.000	22.000	21.000	27.000	29.500
13. Keamanan Dan Ketertiban	0	0	57.000	3.500	67.884	45.000	87.000	20.500	29.500	209.278	40.000
14. Penerangan, Pers dan Komunikasi	42.963	45.449	8.500	1.500	20.196	95.218	212.477	323.160	86.000	196.500	46.925
15. Ilmu Pengetahuan, Tehnologi dan Penelitian	35.884	35.889	83.687	58.000	8.000	14.500	87.000	21.155	50.000	432.584	175.000
16. Aparatur Pemerintah	211.150	145.153	425.680	369.688	1.271.303	896.278	1.913.909	2.204.627	2.634.577	1.418.271	1.598.779
17. Pengembangan Dunia Usaha	21.633	19.005	71.928	44.827	0	0	0	0	0	0	0
18. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup	0	0	350.463	223.008	352.055	280.835	273.410	274.500	419.696	355.879	20.000
19. Subsidi/Bantuan Pembangunan Kepada daerah Bawah untuk menyelenggarakan pemerintah Didaerah yang berasal dari pajak dan Retribusi daerah	0	0	0	34.500	98.900	103.500	103.500	103.500	103.500	1.317.900	2.745.031
20. Pembayaran Kembali Pinjaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>4.173.930</b>	<b>3.862.213</b>	<b>7.358.702</b>	<b>6.007.646</b>	<b>7.188.070</b>	<b>6.211.284</b>	<b>6.993.683</b>	<b>9.351.496</b>	<b>11.246.607</b>	<b>15.945.292</b>	<b>18.798.711</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri

sektor ini; peningkatan pelayanan pendidikan sekolah dasar untuk biaya operasional sebagai pengganti penerimaan dari uang sekolah yang telah dihapuskan dengan program wajib belajar.

Anggaran pengeluaran sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa jumlah sebesar rata-rata 1 milyar pada tahun 1990 sampai tahun 1993 untuk membiayai program pendidikan luar biasa melalui kejar paket A dan B pada penduduk umur 10 tahun keatas sebesar 35 % dari anggaran yang ada dan berhasil menurunkan jumlah buta aksara dan angka dari 34,1 % pada tahun 1990 tahun 2000 turun menjadi 15,5 %; untuk program Inpres SD dengan mendirikan sekolah baru desa yang mempunyai jumlah penduduk besar; untuk meningkatkan berbagai prestasi di bidang olah raga dengan mendirikan club-club baru dibawah naungan pemerintah kota Kediri bekerja sama dengan Gudang Garam dan lembaga pendidikan yang ada. Tetapi mulai tahun 1996 sektor pendidikan generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan kepada Tuhan YME mulai turun jumlah anggarannya dari sekitar 1 milyar menjadi sekitar 500 juta.

Sektor aparatur pemerintah jumlah pengeluarannya pada tahun 1994 dari Rp 369 juta menjadi Rp 1.271 juta atau meningkat sebesar 113,5% sehubungan dengan peningkatan kinerja karyawan pada pemerintah kota Kediri dan adanya kenaikan gaji bagi pegawai terutama pada tahun 1998, biaya aparatur pemerintah mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 113,5 %, karena adanya kenaikan gaji pegawai sipil terutama adanya otonomi daerah. Pengeluaran aparatur pemerintah semakin meningkat karena sebagian besar gaji pegawai negeri yang semula ditanggung oleh pemerintah pusat di limpahkan kepada kepada pemerintah daerah.

Untuk sektor industri yang mempunyai kontribusi terbanyak dalam PDRB, jumlah pengeluarannya kecil dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya disebabkan pada sektor ini sudah bisa diandalkan terutama untuk industri makanan, minuman dan tembakau dimana peranan Gudang Garam sangat dominan terhadap industri tersebut. Sedangkan untuk industri lainnya seperti industri tekstil dan kerajinan rumah tangga masih ditangani oleh pemerintah kota Kediri dengan

tujuan untuk menjaga dan melindungi hasil produksi yang masih baru agar dimasa yang akan datang bisa memberi kontribusi yang besar, sama halnya dengan industri makanan, minuman dan tembakau sehingga pertumbuhan ekonomi kota Kediri tidak hanya bergantung pada Gudang Garam.

Penghematan dan penyempurnaan pengeluaran dapat menurunkan anggaran di satu sisi tetapi di lain pihak untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk pengamanan hasil pembangunan yang telah tercapa, untuk mempertahankan kemantapan dan kesinambungan program dan proyek pembangunan dengan prioritas utama untuk tetap ikut serta menggerakkan dan meningkatkan dunia usaha maka realisasi pengeluaran tidak jauh menyimpang dari anggaran yang telah disepakati.

#### **4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri**

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik jika ditunjang oleh dana yang cukup yang berasal dari penerimaan pajak dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Pada tahun 1990 – 2000, Kota Kediri mengalami pembangunan ekonomi yang meningkat. Pembangunan yang meningkat tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro, salah satunya adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto dapat dilihat dalam dua cara: pertama, Produk Domestik Bruto (PDB) dihitung berdasarkan harga kostan. Dimana produk-produk yang dihasilkan baik berupa barang dan jasa dinilai atau dihitung berdasarkan harga tahun tertentu yang dipakai sebagai acuan. Kedua, Produk Domestik Bruto yang dihitung berdasarkan harga berlaku, perhitungan ini menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan untuk menilai atau menghitung seluruh produk-produk yang dihasilkan baik berupa barang dan jasa.

Nilai PDRB Kota Kediri atas dasar harga berlaku dengan PT Gudang Garam terus mengalami peningkatan dari tahun 1990-2000 dengan rata-rata 16.07%. Peningkatan nilai seperti ini masih dipengaruhi oleh adanya peningkatan harga-harga barang dan jasa yang diperhitungkan dalam penyusunan angka PDRB atas dasar harga berlaku. Oleh karena itu untuk mengetahui peningkatan PDRB yang sebenarnya atau riil, maka angka PDRB disajikan atas dasar harga konstan dengan tahun dasar (harga barang dan jasa) pada tahun 1993. Adapun nilai PDRB Kota Kediri atas dasar harga konstan dengan PT Gudang Garam dari tahun 1990 – 2000 peningkatannya rata-rata 11.39 %.

Dengan perbandingan angka-angka tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian Kota Kediri secara riil terus meningkat dari tahun 1990 – 2000, sedangkan dari tahun 1997-1998 sedikit mengalami penurunan sebagai dampak krisis ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang dihitung dari PDRB merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi yang besar terhadap totalitas perekonomian, maka apabila sektor tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka sektor tersebut sekaligus akan menjadi lokomotif pertumbuhan yang secara total tingkat pertumbuhannya menjadi besar.

Tabel 7: Pertumbuhan Ekonomi kota Kediri tahun 1990/1991 – 2000/2001 (dalam Jutaan rupiah)

Tahun	PDRB dengan Gudang Garam	(%)	PDRB tanpa Gudang Garam	(%)
1990	2.141.665,87	-	841.665,87	-
1991	2.505.035,13	16.97	905.035,13	7,53
1992	2.975.777,29	18.79	975.777,29	7.82
1993	3.635.759,15	22.18	1.082.378,08	10.92
1994	4.105.125,85	12.91	1.139.668,21	5.29
1995	4.655.275,73	13.40	1.238.135,54	8.64
1996	5.269.204,68	13.18	1.336.195,87	7.92
1997	5.891.328,64	11.81	1.406.043,42	5.23
1998	5.744.453,71	-2.49	1.345.349,11	-4.32
1999	5.825.591,49	1.41	1.358.533,53	0.98
2000	6.163.476,42	5.80	1.423.743,14	4.80

Sumber: Lampiran 2, di olah

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi kota Kediri dari tahun 1990/1991 sampai dengan tahun 2000/2001 cukup tinggi, karena pertumbuhannya rata-ratanya diatas 11,39% termasuk Gudang Garam dan tanpa Gudang Garam rata-rata 5,48%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan di Kota Kediri.

Pertumbuhan ekonomi kota Kediri terendah terjadi pada tahun 1998/1999 yaitu sebesar -2,29% dengan Gudang Garam dan sebesar -4,32 % tanpa Gudang Garam, sedangkan pertumbuhan ekonomi kota Kediri tertinggi terjadi pada tahun 1993/1994 yaitu sebesar 22,18% termasuk dengan PT. Gudang Garam dan tanpa adanya PT. Gudang Garam sebesar 10,92 %. Pada tahun 1991/1992 pertumbuhan ekonomi kota Kediri termasuk PT. Gudang Garam sebesar 16,97%, sedangkan tanpa Gudang Garam sebesar 7,53 % dan tahun 1992/1993 pertumbuhan ekonominya meningkat mejadi 18,79% dan 7,82 %.

Pada tahun 1993/1994 pertumbuhan ekonomi kota Kediri mencapai puncaknya yaitu sebesar 22,18%; 10,92 % dan tahun 1994/1995 pertumbuhan ekonominya turun mejadi 12,18%; 5.29 %. Tahun 1995/1996 pertumbuhan ekonomi kota Kediri sebesar 13,40 %; 8.64 % sedangkan tahun 1996/1997 pertumbuhan ekonomi kota Kediri sebesar 13.18 %; 7.92 %. Tahun 1997/1998 pertumbuhan ekonomi kota Kediri sebesar 11,81%; 5.23 % dan tahun 1998/1999

pertumbuhan ekonomi kota Kediri sebesar  $-2,49\%$ ;  $-4,32\%$  yang merupakan pertumbuhan terendah. Tahun 1999/2000 pertumbuhan ekonomi kota Kediri meningkat sebesar  $1,41\%$ ;  $0,98\%$ . dan tahun 2000/2001 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi  $5,80\%$ ;  $4,80\%$ .

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pertumbuhan ekonomi regional tahun 1990 – 2000, maka perlu dilihat perkembangan masing-masing sektor kegiatan. Dari lampiran 2 dapat diketahui bahwa sektor industri mencatat peningkatan riil sebesar 1.492 milyar pada tahun 1990 dan pada tahun 2000 sebesar 4.942 milyar. Sektor industri menentukan pertumbuhan ekonomi kota Kediri sebesar  $78\%$  di tentukan oleh industri pengolahan. Dari  $78\%$  tersebut  $68\%$  berasal dari Gudang Garam. Sedangkan industri lainnya, seperti pabrik pengalengan bekicot yang diekspor ke Perancis, pabrik pengalengan jagung muda dan sawi putih yang dikirim ke Taiwan, industri kayu mebel, kusen dan saniter, serta industri makanan tahu, hanya menyumbang 10 persen saja. Sumbangan untuk perekonomian kota Kediri juga berasal dari sektor perdagangan, restoran, dan hotel, yang seluruhnya berjumlah 17 persen.

Pabrik rokok Gudang Garam juga menentukan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atau total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga kota Kediri. Tahun 1999, misalnya PDRB perkapita Kediri bila digabungkan dengan pendapatan mereka yang bekerja di Gudang Garam mencapai Rp 43 juta per tahun, atau tertinggi di Jawa Timur. Namun, apabila unsur Gudang Garam dihilangkan, PDRB perkapita kota Kediri hanya Rp 1 juta per tahun. Tidak mengherankan apabila kehadiran pabrik Gudang Garam menjadi penentu kemajuan dan perkembangan kota Kediri.

Pabrik rokok Gudang Garam menjadi kontribusi terpenting dalam Pendapatan Asli daerah (PAD). Tahun 1999, kontribusi pabrik rokok kretek tersebut untuk PAD kota Kediri mencapai  $28,7\%$  persen, sementara tahun 2000 kontribusinya meningkat menjadi  $42,50\%$  persen. Kontribusi Gudang Garam melalui PBB, pada tahun 1999 sebesar Rp 985,6 juta; tahun 2000 Rp 995,48 juta dan melalui pajak daerah pada tahun 1999 sebesar Rp 1,05 milyar; tahun 2000 Rp 1,63 milyar.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi kota Kediri cukup baik karena rata-rata pertumbuhannya masih tinggi meskipun pada tahun 1998/1999 pertumbuhannya rendah akibat krisis ekonomi.

#### 4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang didapat berupa data mengenai Pertumbuhan pengeluaran pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kota Kediri tahun 1990 – 2000 di tuangkan dalam tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8 : Pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 1990 – 2000 ( dalam juta rupiah)

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		pengeluaran rutin		Pengeluaran Pembangunan	
	Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
1990	2.141.665,87	-	3.976,601	-	4.173,930	-
1991	2.505.035,13	16,97	4.073,331	2,43	3.862,213	-7,47
1992	2.975.777,29	18,79	4.740,486	16,38	7.358,702	90,53
1993	3.635.759,15	22,18	5.755,280	21,41	6.007,646	-13,36
1994	4.105.125,85	12,91	5.319,618	9,81	7.188,070	19,65
1995	4.655.275,73	13,40	7.550,540	19,48	6.211,284	-13,59
1996	5.269.204,68	13,18	8.259,312	9,39	6.933,683	12,60
1997	5.891.328,64	11,81	10.508,278	27,23	9.351,496	33,80
1998	5.744.453,71	-2,49	25.584,736	143,47	11.248,607	20,22
1999	5.325.591,49	1,41	38.000,492	48,53	15.945,292	41,75
2000	6.163.476,42	5,80	37.234,232	-2,01	18.798,711	17,90

Sumber : Tabel 5, 6 dan tabel 7, di olah

Berdasarkan tabel 8 mengenai pertumbuhan Produk Domestik regional bruto (PDRB), pengeluaran rutin, dan pengeluaran pembangunan dapat dilihat bahwa pertumbuhan Produk domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 1990 secara rata-rata meningkat sebesar 11 %. Produk Domestik Regional Bruto merupakan totalitas nilai produksi dari sektor ekonomi yang mendukung pada suatu periode tertentu, atas dasar harga konstan 1993. Produk domestik Regional Brotu (PDRB) di kota Kediri yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk

Deomestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 1993, karena tidak dipengaruhi adanya perubahan harga dan inflasi sehingga relatif lebih stabil. Pertumbuhan PDRB pada tahun 1998 – 1999 mengalami penurunan sampai -2,49 %, disebabkan oleh pertumbuhan yang negatif hampir diseluruh sektor-sektor ekonomi akibat adanya krisis ekonomi pada pertengahan Juli 1997 tersebut menyebabkan turunnya produktivitas dari sektor-sektor yang ada. Selain itu kurs rupiah yang rendah dan inflasi yang tinggi diikuti tingkat suku bunga dan harga yang tinggi menyebabkan terhambatnya sektor-sektor tersebut. Total pengeluaran pemerintah daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Pengeluaran daerah kota Kediri mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 1998 – 1999. Hal tersebut disebabkan peningkatan dalam sektor pelayanan umum terutama untuk masyarakat golongan rendah berupa pemberian subsidi dan pertumbuhan sektor ekonomi yang bergerak pada bidang pelayanan umum dan industri kecil, seperti pemukiman, kesehatan masyarakat, koperasi dan peningkatan gaji golongan rendah. Hal tersebut bertujuan untuk merubah masyarakat dan pengusaha kecil yang terkena dampak dari pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan industri kecil agar tidak gulung tikar, yang nantinya berdampak pada perekonomian kota Kediri.

#### 4.3 Hasil Analisis Hubungan kausalitas Granger

Data analisis variabel Pengeluaran pemerintah dan PDRB untuk diolah dengan menggunakan analisis hubungan kausalitas Granger didistribusikan pada lampiran 3

Berdasarkan hasil perhitungan timbal balik atau kausalitas dengan variabel yang di analisis PDRB (Y) dan pengeluaran pemerintah (X) menghasilkan persamaan :

$$Y = 0,950 Y_{t-1} + 0,474 X_{t-1}$$

$$X = 0,981 X_{t-1} + 0,00066 Y_{t-1}$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien  $Y_{t-1}$  sebesar 0,950. Hal ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi pada lag satu triwulan sebesar 1 % akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,950 %,
2. Nilai koefisien  $X_{t-1}$  sebesar 0,474. Hal ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah pada lag satu triwulan sebesar 1 % akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,474 %,
3. Nilai koefisien  $X_{t-1}$  sebesar 0,981. Hal ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah pada lag satu triwulan sebesar 1 % akan mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 0,981 %,
4. Nilai koefisien  $Y_{t-1}$  sebesar 0,00065. Hal ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi pada lag satu triwulan sebesar 1 % akan mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 0,00066 %.

#### 4.3.1 Hasil Regresi uji kausalitas Model Granger

Menggunakan Regresi Uji Kausalitas Model Granger variabel PDRB dan Pengeluaran pemerintah, disajikan pada tabel 9.

Tabel 9: Hasil Koefisien Regresi Uji Kausalitas Model Granger

Lag	G terhadap PDRB	Tingkat Signifikan	PDRB terhadap G	Tingkat Signifikan
1	0.474 (0.211) (0.83)	tidak signifikan	0.00066 (1.464) <sup>a</sup> (0.151) <sup>b</sup>	tidak signifikan
2	0.666 (0.198) (0.844)	tidak signifikan	0.0015 (2.276) (0.28)	signifikan
3	0.571 (0.146) (0.889)	tidak signifikan	0.0026 (3.057) (0.04)	signifikan
4	-0.403 (-0.093) (0.922)	tidak signifikan	0.0039 (3.976) (000)	signifikan
5	-1.335 (-0.268) (0.790)	tidak signifikan	0.0049 (4.827) (000)	signifikan

Lampiran : 4 diolah

Keterangan: a = angka probabilitas t hitung

b = angka tingkat signifikan

Berdasarkan tabel 9 diperoleh hasil nilai koefisien regresi yang dilihat dari hasil perbandingan antara probabilitas t-hitung dengan tingkat signifikan dapat dijelaskan salah satunya sebagai berikut:

- a. Pengujian koefisien  $G_{t-2}$  pada persamaan satu menghasilkan nilai probabilitas t hitung sebesar 0,844 sedangkan tingkat signifikan 95 % dan df n-2 adalah sebesar 0,05, maka probabilitas t hitung lebih besar dari tingkat signifikan (  $0,844 > 0,05$  ) dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Berarti pengeluaran pemerintah dengan lag 2 triwulan tidak berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.
- b. Pengujian koefisien  $PBRB_{t-2}$  pada persamaan dua menghasilkan nilai probabilitas t hitung sebesar 0,028 sedangkan tingkat signifikan 95 % dan df n-2 adalah sebesar 0,05, maka probabilitas t hitung lebih kecil dari tingkat signifikan (  $0,028 < 0,05$  ) dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Berarti pengeluaran pemerintah dengan lag 2 triwulan berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

Masing-masing hasil nilai probabilitas t hitung tidak sama dengan nol ( $b_j, d_j \neq 0$ ), menunjukkan bahwa hasil tersebut signifikan. Hasil diatas menunjukkan bahwa beda- kala / lag 5 nilai t statistik pada masing-masing nilai koefisien regresi variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang signifikan tidak sama dengan nol, maka  $b_j \neq 0$ . Sedangkan pengeluaran pemerintah sama dengan nol, maka  $d_j = 0$  atau tidak signifikan.

Berdasarkan tabel 9 terlihat hasil yang menunjukkan adanya hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pengeluaran pemerintah, dapat dilihat dalam tabel 10.

Tabel 11: Kreteria Hasil Pengujian Koefisien regresi antara Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) dan Pengeluaran Pemerintah

Beda-kala PDRB terhadap G ( bj )	G terhadap PDRB ( dj )	Kriteria Koefisien Regresi Hasil Pengujian
5	$\neq 0$	$\neq 0$ terdapat klausalitas dua arah antara dan PDRB Pengeluaran Pemerintah
5	$\neq 0$	$= 0$ terdapat klausalitas satu arah dari PengeluaranPemerintah

Sumber : Lampiran 4 di olah

Tabel 10 menunjukkan bahwa terdapat hubungan satu arah antara Produk domestik Regional Bruto ( PDRB ) dan Pengeluaran Pemerintah dengan menggunakan beda-kala/ lag 5. Regresi dengan menggunakan beda-kala 5 pada tingkat *degree of freedom* ( df ) sama dengan 38, menunjukkan bahwa terjadi hubungan satu arah simetrik waktu antara Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) dan Pengeluaran Pemerintah. Hasil Tersebut dapat dilihat pada tabel 9. pada tabel tersebut, pengaruh Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) terhadap Pengeluaran Pemerintah Ini berarti bahwa kenaikan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRE ) pada tahun yang lalu menyebabkan kenaikan jumlah pengeluaran Pemerintah pada tahun yang sedang berjalan. Sedangkan Hasil penelitian dengan menggunakan beda-kala 5 diatas, menunjukkan bahwa pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB pada tabel 10 yang semuanya tidak signifikan sama dengan nol. Berarti kenaikan jumlah Pengeluaran Pemerintah pada tahun yan sedang berjalan tidak akan menyebabkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) satu tahun kemudian.).

#### 4.4 Analisis Regresi distribusi Lag Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pengeluaran Pemerintah

Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) sebagai variabel bebas terhadap Pengeluaran Pemerintah sebagai variabel terikat digunakan hasil analisis distribusi Lag dari data lampiran 5 yang menghasilkan persamaan sebagai berikut :

$$X = -583,301 + 2,79 Y + 4,70 Y_{t-1} + 4,84 Y_{t-2} + 5,01 Y_{t-3} + 5,28 Y_{t-4}$$

t – Stat            ( 8,81 )    ( 8,12 )    ( 8,32 )    8,74 )    ( 9,42 )

Dimana :

Y        = Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB )

X        = Pengeluaran Pemerintah

Xt-i     = Pengeluaran Pemerintah sebelum tahun t

Dari persamaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta ( a ) = -583,301 mempunyai arti bahwa tanpa Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) sebagai faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah atau konstan, maka pengeluaran pemerintah bernilai negatif atau turun. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Pertumbuhan ekonomi dan ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhinya.
- b. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) tahun t atau  $\beta_0$  mempunyai koefisien regresi sebesar 2.75, hal ini berarti bahwa jika nilai Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) dianggap Konstan, kenaikan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) sebesar Rp. 10.000 akan menyebabkan jumlah pengeluaran Pemerintah naik sebesar Rp. 27.500 . Tanda positif pada koefisien variabel menunjukkan hubungan yang searah antara Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) dan Pengeluaran Pemerintah. Jika terjadi Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) akan meningkatkan Pengeluaran Pemerintah.
- c. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) tahun t-1 atau  $\beta_1$  mempunyai koefisien regresi sebesar 4.70, hal ini berarti bahwa jika nilai Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) dianggap Konstan, kenaikan Produk

Domestik Regional Bruto ( PDRB ) sebesar Rp. 10.000 akan menyebabkan jumlah pengeluaran Pemerintah naik sebesar Rp. 47.000 . Tanda positif pada koefisien variabel menunjukkan hubungan yang searah antara Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) dan Pengeluaran Pemerintah. Jika terjadi Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) akan meningkatkan Pengeluaran Pemerintah

- d. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) tahun t-2 atau  $\beta_2$  mempunyai koefisien regresi sebesar 4.84, hal ini berarti bahwa jika nilai Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) dianggap Konstan, kenaikan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) sebesar Rp. 10.000 akan menyebabkan jumlah pengeluaran Pemerintah naik sebesar Rp 48.400 . Tanda positif pada koefisien variabel menunjukkan hubungan yang searah antara Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) dan Pengeluaran Pemerintah. Jika terjadi Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) akan meningkatkan Pengeluaran Pemerintah
- e. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) tahun t-3 atau  $\beta_3$  mempunyai koefisien regresi sebesar 50.1, hal ini berarti bahwa jika nilai Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) dianggap Konstan, kenaikan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) sebesar Rp. 10.000 akan menyebabkan jumlah pengeluaran Pemerintah naik sebesar Rp. 50.100 . Tanda positif pada koefisien variabel menunjukkan hubungan yang searah antara Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) dan Pengeluaran Pemerintah. Jika terjadi Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) akan meningkatkan Pengeluaran Pemerintah.
- f. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) tahun t atau  $\beta_0$  mempunyai koefisien regresi sebesar 5.28, hal ini berarti bahwa jika nilai Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) dianggap Konstan, kenaikan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) sebesar Rp. 10.000 akan menyebabkan jumlah pengeluaran Pemerintah naik sebesar Rp. 52.800 . Tanda positif pada koefisien variabel menunjukkan hubungan yang searah antara Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) dan Pengeluaran Pemerintah. Jika terjadi

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) akan meningkatkan Pengeluaran Pemerintah

#### 4.4.1 Pengujian Secara Statistik

##### A. Pengujian regresi secara Parsial

Untuk mengetahui pengaruh masing – masing koefisien regresi variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial digunakan uji t atau t-test yaitu dengan cara membandingkan antara probabilitas t-hitung dengan level of signifikan (  $\alpha$  ). Apabila probabilitas t-hitung lebih kecil dari level of signifikan (  $\alpha$  ) berarti secara parsial ada pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebas. Sebaliknya apabila probabilitas t-hitung lebih besar dari level of signifikan (  $\alpha$  ) berarti secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebas.

Tabel 11: Analisa Varian Untuk Pengujian Regresi distribusi Lag Secara Parsial

Variabel	koefisien	t-hitung	probabilitas t-hit.
Bebas	Regresi		$\alpha = 5\%$
Y	2.79	8.81	0.000
Yt-1	4.70	8.12	0.000
Yt-2	4.84	8.32	0,000
Yt-3	5.04	8.74	0,000
Yt-4	5.28	9.42	0.000

Sumber : Lampiran 5, di olah

Hasil analisis regresi untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas diperoleh:

- Pengujian terhadap koefisien regresi Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) tahun t ( Y ), dengan tingkat signifikan (  $\alpha$  ) = 5% dan pada derajat kebebasan ( df ) = n - k - 1 = 43. Dari hasil perhitungan diperoleh probabilitas t-hitung sebesar 0,00 berarti sesuai dengan kriteria bahwa bila probabilitas t-hitung lebih kecil dari level of signifikan (  $\alpha$  ) atau  $0,00 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya adanya pengaruh yang sangat signifikan antara

- variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan variabel Pengeluaran pemerintah tahun  $t$  ( $X$ ).
- b. Pengujian terhadap koefisien regresi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun  $t-1$  ( $Y_{t-1}$ ), dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) = 5% dan pada derajat kebebasan ( $df$ ) =  $n - k - 1 = 42$ . Dari hasil perhitungan diperoleh probabilitas  $t$ -hitung sebesar 0,00, berarti sesuai dengan kriteria bahwa bila probabilitas  $t$ -hitung lebih kecil dari level of signifikan ( $\alpha$ ) atau  $0,00 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya adanya pengaruh yang sangat signifikan antara variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun  $t-1$  ( $Y_{t-1}$ ) dengan variabel Pengeluaran pemerintah.
  - c. Pengujian terhadap koefisien regresi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun  $t-2$  ( $Y_{t-2}$ ), dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) = 5% dan pada derajat kebebasan ( $df$ ) =  $n - k - 1 = 41$ . Dari hasil perhitungan diperoleh probabilitas  $t$ -hitung sebesar 0,000, berarti sesuai dengan kriteria bahwa bila probabilitas  $t$ -hitung lebih kecil dari level of signifikan ( $\alpha$ ) atau  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya adanya pengaruh yang sangat signifikan antara variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun  $t-2$  ( $Y_{t-2}$ ) dengan variabel Pengeluaran pemerintah.
  - d. Pengujian terhadap koefisien regresi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun  $t-3$  ( $Y_{t-3}$ ), dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) = 5% dan pada derajat kebebasan ( $df$ ) =  $n - k - 1 = 40$ . Dari hasil perhitungan diperoleh probabilitas  $t$ -hitung sebesar 0,000 berarti sesuai dengan kriteria bahwa bila probabilitas  $t$ -hitung lebih kecil dari level of signifikan ( $\alpha$ ) atau  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya adanya pengaruh yang sangat signifikan antara variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun  $t-3$  ( $Y_{t-3}$ ) dengan variabel Pengeluaran pemerintah.
  - e. Pengujian terhadap koefisien regresi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun  $t-4$  ( $Y_{t-4}$ ), dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) = 5% dan pada derajat kebebasan ( $df$ ) =  $n - k - 1 = 39$ . Dari hasil perhitungan diperoleh probabilitas  $t$ -hitung sebesar 0,00 berarti sesuai dengan kriteria bahwa bila probabilitas  $t$ -

hitung lebih kecil dari level of signifikan ( $\alpha$ ) atau  $0,00 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya adanya pengaruh yang sangat signifikan antara variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun  $t-4$  ( $Y_{t-4}$ ), dengan variabel Pengeluaran pemerintah.

### B. Pengujian Regresi secara Bersama-sama/ Serentak

Untuk menguji koefisien regresi secara bersama-sama dari variabel bebas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pengeluaran Pemerintah variabel terikat digunakan Uji  $f$  atau  $f$ -test, yaitu dengan cara membandingkan antara probabilitas  $F$ -hitung dengan level of signifikan ( $\alpha$ ). Apabila probabilitas  $F$ -hitung lebih kecil dari level of signifikan ( $\alpha$ ) berarti secara serentak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Tabel 12: Analisa Varian Untuk Pengujian Regresi distribusi Lag Secara Bersama-sama/ Serentak

Variabel	$R^2$	$f$ -hitung	probabilitas $f$ -hit.
Bebas			$\alpha = 5\%$
Y	0.649	77.665	0.000
$Y_{t-1}$	0.617	66.052	0.000
$Y_{t-2}$	0.634	69.222	0.000
$Y_{t-3}$	0.662	76.471	0,000
$Y_{t-4}$	0.701	88.908	0.000

Sumber : Lampiran 9, di olah

Dari hasil perhitungan pada tabel 12 diatas diperoleh Probabilitas  $F$ -hitung sebesar 0,00 pada tingkat keyakinan 0,95 atau tingkat kesalahan 0,05. Dengan demikian probabilitas  $F$ -hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan ( $\alpha$ ), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti secara serentak berpengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pengeluaran pemerintah

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) merupakan nilai yang dipergunakan untuk mengukur untuk mengukur sumbangan variabel bebas (Produk Domestik Regional Bruto) Terhadap variasi naik turunnya variabel terikat (Pengeluaran Pemerintah). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada triwulan 1, hubungan PDRB

terhadap pengeluaran pemerintah menunjukkan angka 0,649. hal ini berarti 64,96% PDRB mempengaruhi pengeluaran pemerintah pada triwulan yang berjalan, sisanya 5,04 % disebabkan oleh faktor lain.

#### 4.5 PEMBAHASAN

Analisis hubungan kausalitas atau hubungan timbal balik antara dua variabel merupakan analisis runtun waktu (*time series*) jangka pendek. Dalam analisis ekonometrika, penelitian mengenai kausalitas antara variabel-variabel ekonomi seperti dua sisi keping mata uang, sehingga kontribusi Granger tentang definisi kausalitas dalam konteks analisis runtun waktu merupakan sumbangan besar terutama teoritis dan praktisi ekonometrika. Konsep kausalitas Granger dikenal juga sebagai konsep sejati atau Prediktabilitas (*Predictability concept*) dimana masa lalu dapat mempengaruhi masa kini atau masa datang, akan tetapi masa kini atau masa datang tidak bisa mempengaruhi masa lalu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, sedangkan politik anggaran diyakini sebagai salah satu alat yang dapat dipakai untuk mempengaruhi struktur perekonomian. Kegiatan – kegiatan pembangunan itu sendiri, akan sangat ditentukan untuk tujuan akhir yang akan dicapai oleh tujuan pembangunan dan untuk dana yang tersedia dalam perekonomian, baik yang ada ditangan individu atau swasta maupun ditangan pemerintah. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bertindak sebagai alat pengatur sektor prioritas pembangunan untuk tiap tahun anggaran dengan mempertimbangkan tujuan – tujuan yang akan dicapai oleh usaha pembangunan kota kediri.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan anggaran Pengeluaran atau Belanja Pemerintah merupakan dua variabel yang sangat berhubungan. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis kausalitas model Granger dan didukung dengan hasil analisis regresi distribusi lag yang menunjukkan pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pengeluaran Pemerintah.

Untuk menguji atau membuktikan seberapa besar pengaruh nyata variabel pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah di gunakan uji t dengan

derajat keyakinan 95 % dan *degree of freedom*  $n-2$ . Dari perhitungan menunjukkan pengaruh yang nyata dari pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah selama satu tahun. Hal ini berarti bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada satu tahun yang lalu dapat memberikan dampak bagi pengeluaran pemerintah sebesar 5,28 %.

Hipotesis tersebut merupakan kesimpulan sementara yang didasarkan pada penelitian sebelumnya dan berdasarkan teori-teori ekonomi yang mendukung. Berdasarkan penelitian sebelumnya dengan menggunakan regresi linier berganda telah dianalisa mengenai pengaruh subsidi dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten Jember tahun 1990 – 2000. Kesimpulan dari penelitian tersebut diketahui bahwa subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan asli daerah sebagai variabel terikat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember sebagai Variabel bebas. Selanjutnya dalam analisis ini dapat dibuktikan bahwa terdapat hubungan satu arah antara Pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri dan Pengeluaran Pemerintah dengan menggunakan analisis kausalitas model Granger dan diketahui terdapat pengaruh antara pemerintah Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) dikota Kediri dengan pengeluaran pada tahun 1990 – 2000 dengan menggunakan analisis regresi distribusi lag.

Menurut hukum Wagner, Peacock dan Wiseman ( Suparmoko , 1990 ; 24-25 ), bahwa pengeluaran pemerintah itu selalu meningkat dari tahun ketahun baik dalam arti uang maupun secara riil ataupun secara absolut maupun relatif dalam perbandingannya dalam pendapatan nasional yang disebabkan adanya perkembangan sosial karena berkembangnya industri. Akibat kenaikan Pengeluaran Pemerintah terutama yang diprioritaskan untuk sektor – sektor pembangunan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan mengalami perubahan dalam bobot alokasi anggaran pembangunan membawa konsekuensi dalam struktur perekonomian sehingga mengalami peningkatan dalam sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ). Dengan struktur perekonomian yang baru maka strategi kebijaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Negara harus diadakan penyesuaiaan dengan melihat

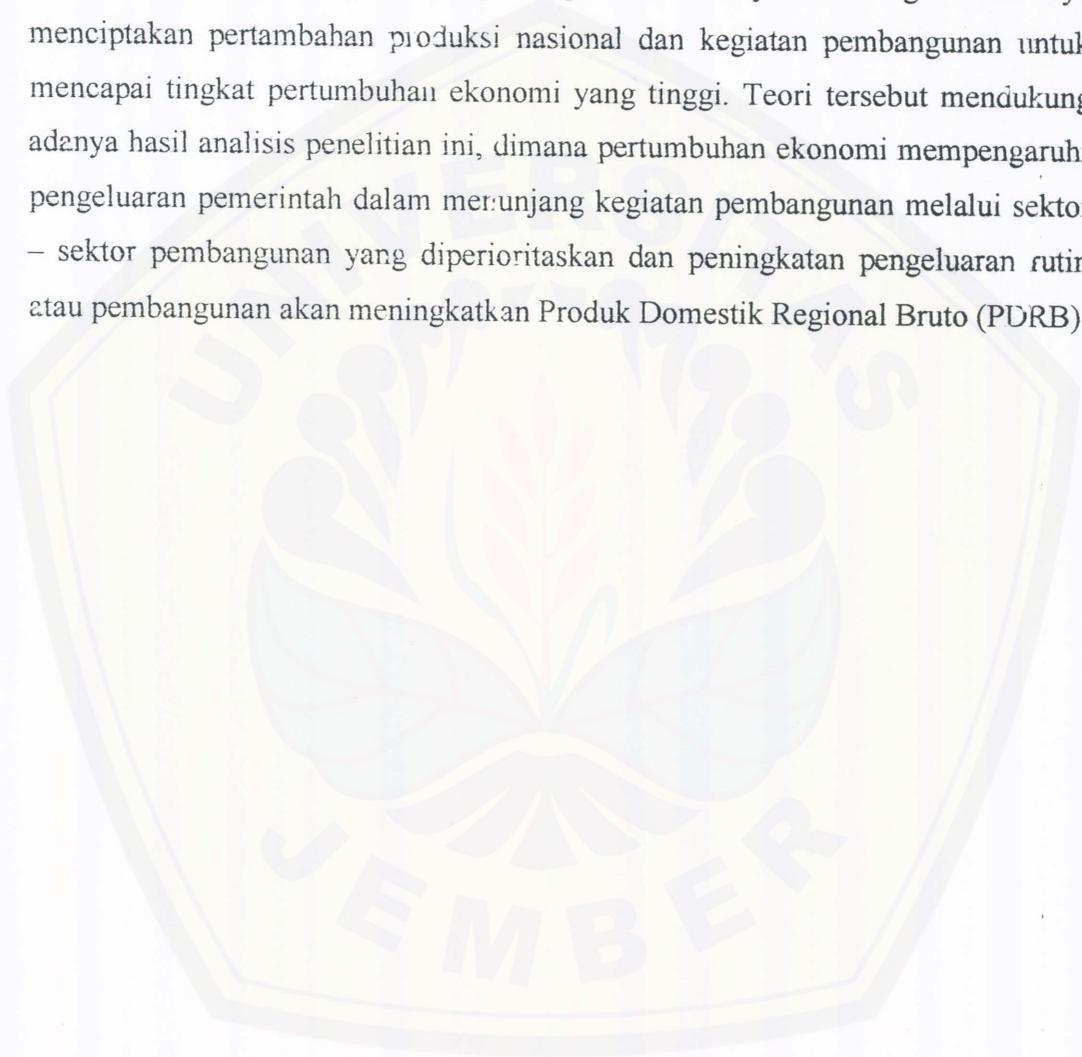
sektor – sektor mana yang memiliki potensi sebagai sumber penerimaan Kota Kediri yang utama serta sektor – sektor mana yang harus lebih didorong perkembangannya untuk membiayai Pengeluaran Pemerintah dalam Kegiatan Pembangunan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pertumbuhan yang semakin meningkat akibat adanya kegiatan ekonomi yang meningkat pula, juga akan mengakibatkan pengeluaran pemerintah naik untuk menunjang pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah Kota Kediri. Hal ini sesuai dengan teori Schumpeter, akibat adanya peningkatan pertumbuhan maka pendapatan perkapita daerah akan semakin tinggi dan tingkat konsumsi pemerintah atau pengeluaran pemerintah akan bertambah. Kenaikan tersebut akan mendorong pemerintah dan swasta untuk menghasilkan banyak barang dan melakukan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa mendatang, mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, penghematan pengeluaran pemerintah dan menyediakan kesempatan kerja lebih banyak. (Boediono, 1999 ; 432 )

Menurut penelitian ini Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB) mempengaruhi pengeluaran pemerintah, selanjutnya untuk mengetahui adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi ( dalam hal ini PDRB ) terhadap pengeluaran pemerintah, maka digunakan analisis regresi distribusi lag. Hasil analisis tersebut seperti dapat dilihat dalam tabel 11. Hasil analisis data dengan menggunakan regresi distribusi lag antara Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) terhadap pengeluaran pemerintah, ternyata sesuai dengan Hipotesis. Dimana menurut hasil hipotesis dinyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB) mempunyai pengaruh ketergantungan yang nyata terhadap pengeluaran pemerintah.

Setelah dianalisa dengan menggunakan uji t untuk menganalisa secara parsial setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan tingkat signifikan (  $\alpha$  ) = 5%, ternyata variabel Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB) pada satu tahun sebelumnya (  $Y_{t-1}$  ) atau selama 4 triwulan (lag 4) berpengaruh secara signifikan terhadap Pengeluaran pemerintah.

Teori klasik menyatakan bahwa pembentukan modal adalah pengeluaran yang mempertinggi jumlah alat-alat modal dalam masyarakat. Kalau kesanggupan mempertinggi alat-alat produksi bertambah maka dengan sendirinya produksi dan pendapatan nasional akan bertambah tinggi dan pembangunan akan tercipta. Kaum klasik berpendapat bahwa *supply Creates Its Own Demand* berarti bertambahnya alat-alat modal yang terdapat dalam masyarakat dengan sendirinya menciptakan pertambahan produksi nasional dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Teori tersebut mendukung adanya hasil analisis penelitian ini, dimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah dalam menunjang kegiatan pembangunan melalui sektor – sektor pembangunan yang diprioritaskan dan peningkatan pengeluaran rutin atau pembangunan akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).





## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan satu arah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ) terhadap pengeluaran pemerintah terjadi pada beda kala 5 pada tingkat signifikan 95%. Ini berarti bahwa kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah pada tahun berjalan.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ) berpengaruh secara signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah berdasarkan hasil analisis regresi distribusi lag dengan polinomial 2 (kuadrat) pada 4 triwulan (1 tahun) atau lag 4, berarti bahwa kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ) pada dua tahun akan menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah pada tahun berjalan.
3. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pengeluaran pemerintah karena berdasarkan uji t dihasilkan probabilitas t-hitung lebih kecil dari Level of signifikan (  $\alpha$  ) = 5%, berarti bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto ( PDRE ) berpengaruh secara individu (parsial) terhadap pengeluaran pemerintah.
4. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) melalui Uji F mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah pada Probabilitas F-hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan (  $\alpha$  ) = 5%, yang berarti secara serentak variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

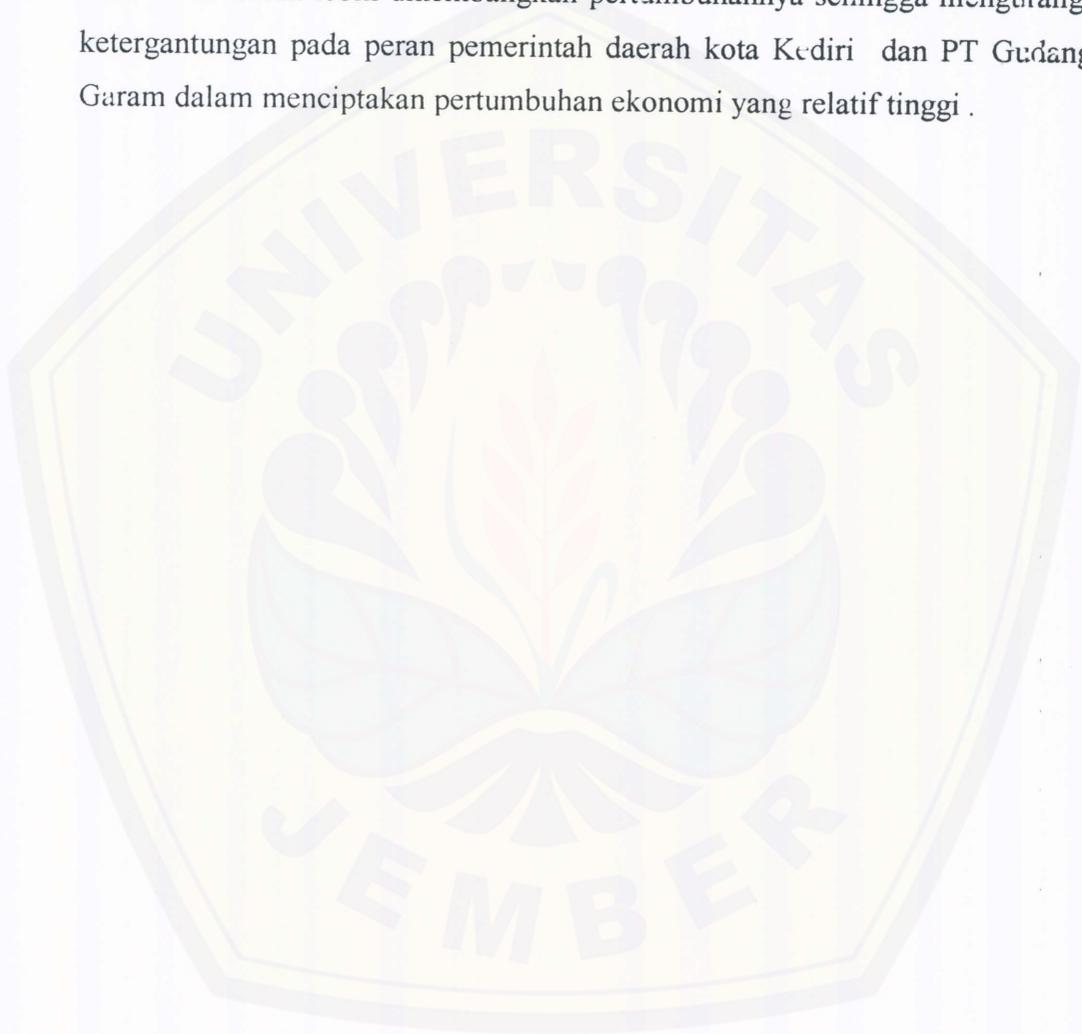
### 5.2 Saran

Saran - saran yang dapat penulis ajukan sehubungan dengan penelitian ini :

1. Untuk dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi ( dalam hal ini PDRB ) yang cukup tinggi di kota Kediri dan tidak hanya bergantung pada pengeluaran pemerintah daerah, maka pemerintah kota Kediri diharapkan berusaha untuk mendorong sektor-sektor lain melalui kenaikan tabungan

pemerintah daerah, swasta dan produktivitas investasi yang dapat menunjang pembangunan dan tetap mempertahankan peranan pengeluaran pemerintah daerah kota Kediri yang cukup penting untuk kegiatan pembangunan.

2. Meningkatkan peran serta swasta terutama industri-industri kecil yang ada di kota Kediri untuk lebih dikembangkan pertumbuhannya sehingga mengurangi ketergantungan pada peran pemerintah daerah kota Kediri dan PT Gudang Garam dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi .



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Universitas Indonesia pers. Jakarta.
- Arsyat, Anwar. 1992. *Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek dan Sumber Pembiayaan dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Arsjad, Nurdjaman, dkk. 1992. *Keuangan Negara*. Intermedia. Jakarta.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Anonim. 1986. *Indikator Ekonomi*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- . 2002. *Kediri dalam Angka Tahun 1990 –2000*. Badan Pusat Statistik. Kediri.
- . 2000. *Pola Dasar Pembangunan Daerah*. Badan Perencanaan Daerah. Kediri
- . 1999. *Nota Keuangan Negara Indonesia*. Jakarta
- Artha, Lilyan. 1998. *Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi dIndonesia Tahun 1989 – 1998*. Skripsi tidak dipublikasikan. Jember. Fakultas Ekonomi.
- Aziz, Sri Woelan. 1996. *Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan Di Indonesia*. Citra Media Karya Anak Bangsa. Surabaya.
- Budiono. 1990. *Ekonomi makro*. BPFE. Yogyakarta.
- Badjuri, 1999, *Perekonomian Indonesia*, Kurnia offset, Universitas Jember
- Dumairy, 1997, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Fisher, S dan Dornburh. 1994. *Makroekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Gujarati, Damodar. 1995. *Ekonometrika Dasar*. Erlangga. Jakarta.
- Insukrindro. 1997. *Ekonomi Uang dan Bank*. BPFE UGM. Yogyakarta
- Jhingan, M.L. 1990. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Fers. Jakarta.

- Kunarjo. 1996. *Perencanaan dan Pembinaan Pembangunan*. Uninersitas Indonesia. Jakarta
- Lipsey, Richard G. at.al. 1995. *Pengantar makroekonomi*. Binarupa aksara. Jakarta.
- Mamesah, D.J. 1995 *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1996. *Ekonomi Publik*. BPPE UGM. Yogyakarta.
- Nuridin, Thamrin. 1995. *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Lima Tahun Mendatang*. Bank BNI 46. Hal 87- 90.
- Roychan, Zawawi. 2001. *Pengaruh Subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Jember Tahun 1990- 2000*. Skripsi tidak dipublikasikan. Jember. Fakultas Ekonomi
- Republik Indonesia. 1993. *Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)*, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.
- Suparmoko. 1996. *Keuangan Negara*. BPFE. Yogyakarta.
- Supriatna, Tjahja. 1993. *Sistem Admnistrasi Pemerintah Daerah*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suseno, Triyanto Widodo. 1991. *Indikator Ekonomi*. Kanisus. Jakarta.
- Syahrir, 1992. *Analisis Ekonomi Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- [www. Ut.ac.id /ol-supp/ekon4110/m4.htm](http://www.Ut.ac.id/ol-supp/ekon4110/m4.htm)

## Lampiran 1

**REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II  
KOTA KEDIRI TAHUN 1990 - 2000  
( 000 RUPLAH)**

JENIS PENERIMAAN/PENGELUARAN	1990	1991
<b>A. PENERIMAAN</b>		
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	7.863.163	7.981.530
2. Pendapatan Asli Daerah	35.826	36.648
2.1 Pajak Daerah	1.812.687	1.789.842
2.2 Restribusi Daerah	425.116	400.640
2.3 Laba Badan Usaha Milik Daerah	1.329.558	1.342.102
2.4 Penerimaan dari Dinas-Dinas	29.568	29.375
2.5 Penerimaan lain-lain	0	0
3. Bagi Hasil pajak/bukan pajak	28.445	17.743
3.1. Bagi hasil pajak	311.983	880.534
3.2. Bagi hasil bukan pajak	869.332	846.534
4. Sumbangan dan bantuan	42.651	846.984
4.1. Sumbangan	5.102.631	5.274.526
4.2. Bantuan	2.012.966	2.013.320
5. Penerimaan pembangunan	3.089.665	3.261.197
5.1. Pinjaman pemerintah daerah	0	0
5.2. Pinjaman BUMD	0	0
	0	0
<b>B. PENGELUARAN RUTIN</b>		
1. Belanja pegawai	3.976.601	4.073.331
2. Belanja barang	1.926.041	1.916.042
3. Biaya pemeliharaan	885.694	838.425
4. Belanja Perjalanan Dinas	348.226	347.383
5. Belanja Lain - lain	52.11	43.835
6. Angsuran Pinjaman / Hutang dan bunga	752.261	806.479
7. Ganjaran/ Sumbasi/ Sumbangan	0	0
8. Pensiunan/ Bantuan dan onderstand	0	0
9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	0	0
10. Pengeluaran tidak disangka	12.269	121.166
	0	0
<b>C. PENGELUARAN PEMBANGUNAN</b>		
1. Pertanian dan Pengairan	4.173.930	3.862.213
2. Industri	21.266	750
3. Pertambangan dan Energi	4.000	3.000
4. Perhubungan dan Wisata	12.500	0
5. Perdagangan dan Koperrasi	2.011.362	1.930.965
6. Tenaga kerja Dan Transmigrasi	1.000	1000
7. Pembangunan Daerah	4.251	735
8. Agama	455.611	408.002
9. Pendidikan dan Generasi Muda, Kebudayaan Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	0	0
	1.245.266	1.143.907
10. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana ( KB )	102.554	124.798
11. Perumahan rakyat dan Pemukiman	0	0
12. Hukum	0	0
13. Keamanan Dan Ketertiban	4.500	3.500
14. Penerangan, Pers dan Komunikasi	0	0
15. Ilmu Pengetahuan, Tehnologi dan Penelitian	42.963	45.449
16. Aparatur Pemerintah	35.884	35.889
17. Pengembangan Dunia Usaha	211.150	145.153
18. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup	21.633	19.005
19. Subsidi/Bantuan Pembangunan Kepada daerah Bawahan untuk menyelenggarakan pemerintah Didaerah yang berasal dari pajak dan Retribusi daerah	0	0
	0	0
20. Pembayaran Kembali Pinjaman	0	0
	0	0
<b>D. JUMLAH PENGELUARAN ( B+C )</b>	<b>8.150.531</b>	<b>7.935.544</b>

JENIS PENERIMAAN/PENGELUARAN	1992	1993	1994
<b>A. PENERIMAAN</b>			
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	12.111.113	11.838.876	13.591.061
2. Pendapatan Asli Daerah	46.006	11.925	75.95
2.1 Pajak Daerah	2.104.071	2.402.182	2.704.820
2.2 Restribusi Daerah	512.10	528.377	665.515
2.3 Laba Badan Usaha Milik Daerah	1.492.264	1.803.343	1.943.096
2.4 Penerimaan dari Dinas-Dinas	29.805	26.347	27.986
2.5 Penerimaan lain-lain	0	0	1.262
3. Bagi Hasil pajak/bukan pajak	69.906	44.115	66.961
3.1. Bagi hasil pajak	1.198.147	1.734.263	2.505.579
3.2. Bagi hasil bukan pajak	1.130.526	1.688.918	2.446.090
4. Sumbangan dan bantuan	67.521	45.345	59.483
4.1. Sumbangan	8.547.889	7.690.506	7.869.847
4.2. Bantuan	2.462.237	2.961.700	3.176.531
5. Penerimaan pembangunan	6.121.652	4.728.806	4.693.316
5.1. Pinjaman pemerintah daerah	215.000	0	434.865
5.2. Pinjaman BUMD	215.000	0	434.865
	0	0	0
<b>B. PENGELUARAN RUTIN</b>	<b>4.740.486</b>	<b>5.755.280</b>	<b>6.319.618</b>
1. Belanja pegawai	2.404.792	2.920.403	3.193.057
2. Belanja barang	971.100	810.235	836.348
3. Biaya pemeliharaan	467.386	463.326	542.593
4. Belanja Perjalanan Dinas	71.371	76.280	79.006
5. Belanja Lain - lain	672.428	1.312.430	1.414.456
6. Angsuran Pinjaman / Hutang dan bunga	0	0	0
7. Ganjaran/ Sumbasi/ Sumbangan	0	0	0
8. Pensiunan/ Bantuan dan onderstand	0	0	0
9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	133.969	172.606	254.153
10. Pengeluaran tidak disangka	19.440	0	0
<b>C. PENGELUARAN PEMBANGUNAN</b>	<b>7.358.702</b>	<b>6.007.646</b>	<b>7.188.070</b>
1. Pertanian dan Pengairan	31.000	1.000	2.000
2. Industri	9.000	16.149	12.335
3. Pertambangan dan Energi	15.052	2.077	4.970
4. Perhubungan dan Wisata	4.169.698	2.415.912	1.604.028
5. Perdagangan dan Koperrasi	1.000	500	230.626
6. Tenaga kerja Dan Transmigrasi	8.635	615	26.000
7. Pembangunan Daerah	544.431	1.161.423	2.430.073
8. Agama	17.485	9.991	15.000
9. Pendidikan dan Generasi Muda, Kebudayaan Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1.422.452	1.073.803	651.046
10. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana ( KB )	58.316	97.383	383.154
11. Perumahan rakyat dan Pemukiman	77.130	490.29	3.500
12. Hukum	7.250	3.500	7.000
13. Keamanan Dan Ketertiban	57.000	3.500	67.884
14. Penerangan, Pers dan Komunikasi	8.500	1.500	20.196
15. Ilmu Pengetahuan, Tehnologi dan Penelitian	83.687	58.000	8.000
16. Aparatur Pemerintah	425.680	369.688	1.271.303
17. Pengembangan Dunia Usaha	71.928	44.827	0
18. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup	350.463	223.008	352.055
19. Subsidi/Bantuan Pembangunan Kepada daerah Bawah untuk menyelenggarakan pemerintah Didaerah yang berasal dari pajak dan Retribusi daerah	0	34.500	98.900
20. Pembayaran Kembali Pinjaman	0	0	0
<b>D. JUMLAH PENGELUARAN ( B+C )</b>	<b>12.099.188</b>	<b>11.762.926</b>	<b>13.507.638</b>

JENIS PENERIMAAN/PENGELUARAN	1995	1996	1997
<b>A. PENERIMAAN</b>			
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	14.352.198	16.310.537	21.100.154
2. Pendapatan Asli Daerah	83.373	590.374	1.057.542
2.1 Pajak Daerah	3.355.117	2.741.039	4.582.516
2.2 Restribusi Daerah	1.308.573	1.645.968	1.823.983
2.3 Laba Badan Usaha Milik Daerah	1.938.580	2.299.870	2.577.411
2.4 Penerimaan dari Dinas-Dinas	29.782	32.620	46.030
2.5 Penerimaan lain-lain	1.508	2.294	1.771
3. Bagi Hasil pajak/bukan pajak	76.674	241.687	133.271
3.1. Bagi hasil pajak	3.148.581	3.209.395	4.323.099
3.2. Bagi hasil bukan pajak	3.029.188	3.041.695	4.116.033
4. Sumbangan dan bantuan	119.393	117.700	207.066
4.1. Sumbangan	7.765.127	9.436.719	10.730.997
4.2. Bantuan	3.749.727	4.381.919	5.166.423
5. Penerimaan pembangunan	4.015.400	5.054.800	5.564.574
5.1. Pinjaman pemerintah daerah	0	333.010	406.000
5.2. Pinjaman BUMD	0	333.010	406.000
	0	0	0
<b>B. PENGELUARAN RUTIN</b>	<b>7.550.540</b>	<b>8.259.312</b>	<b>10.508.278</b>
1. Belanja pegawai	3.653.631	4.207.662	6.083.268
2. Belanja barang	1.113.969	1.455.118	1.460.470
3. Biaya pemeliharaan	386.712	429.635	435.114
4. Belanja Perjalanan Dinas	89.621	146.430	140.230
5. Belanja Lain - lain	2.035.666	1.679.836	1.907.747
6. Angsuran Pinjaman / Hutang dan bunga	0	0	0
7. Ganjaran/ Sumbasi/ Sumbangan	0	0	35.000
8. Pensiunan/ Bantuan dan onderstand	0	0	0
9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	270.941	335.131	508.449
10. Pengeluaran tidak disangka	0	5.500	8.000
<b>C. PENGELUARAN PEMBANGUNAN</b>	<b>6.211.284</b>	<b>6.993.683</b>	<b>9.351.496</b>
1. Pertanian dan Pengairan	37.000	170.000	91.515
2. Industri	27.000	49.090	60.500
3. Pertambangan dan Energi	0	110.300	74.272
4. Perhubungan dan Wisata	1.465.420	1.011.793	1.812.979
5. Perdagangan dan Koperrasi	420.591	295.800	328.589
6. Tenaga kerja Dan Transmigrasi	32.500	8.000	6.000
7. Pembangunan Daerah	1.982.444	1.695.552	1.915.480
8. Agama	37.250	23.500	40.250
9. Pendidikan dan Generasi Muda, Kebudayaan Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	561.515	615.591	812.761
10. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana ( KB )	200.733	238.261	257.816
11. Perumahan rakyat dan Pemukiman	3.500	73.500	981.892
12. Hukum	9.000	22.000	22.000
13. Keamanan Dan Ketertiban	45.000	87.000	20.500
14. Penerangan, Pers dan Komunikasi	95.218	212.477	323.160
15. Ilmu Pengetahuan, Tehnologi dan Penelitian	14.500	87.000	21.155
16. Aparatur Pemerintah	896.278	1.913.909	2.204.627
17. Pengembangan Dunia Usaha	0	0	0
18. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup	280.835	273.410	274.500
19. Subsidi/Bantuan Pembangunan Kepada daerah Bawahan untuk menyelenggarakan pemerintah Didaerah yang berasal dari pajak dan Retribusi daerah	103.500	103.500	103.500
20. Pembayaran Kembali Pinjaman	0	0	0
<b>D. JUMLAH PENGELUARAN ( B+C )</b>	<b>13.761.824</b>	<b>15.252.995</b>	<b>19.559.771</b>

JENIS PENERIMAAN/PENGELUARAN	1998	1999	2000
<b>A. PENERIMAAN</b>	<b>39.657.331</b>	<b>56.611.081</b>	<b>55.784.994</b>
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	1.240.380	2.802.081	2.655.380
2. Pendapatan Asli Daerah	7.453.003	7.775.510	7.871.025
2.1 Pajak Daerah	2.161.460	2.332.316	2.498.038
2.2 Restribusi Daerah	4.593.785	1.896.620	1.735.212
2.3 Laba Badan Usaha Milik Daerah	58.996	50.000	0
2.4 Penerimaan dari Dinas-Dinas	6.698	0	0
2.5 Penerimaan lain-lain	632.064	3.496.574	3.637.775
3. Bagi Hasil pajak/bukan pajak	5.476.654	6.321.301	6.976.694
3.1. Bagi hasil pajak	5.320.807	6.258.565	6.899.614
3.2. Bagi hasil bukan pajak	155.847	62.736	77.080
4. Sumbangan dan bantuan	24.984.374	39.426.824	38.281.895
4.1. Sumbangan	17.425.052	26.105.330	24.400.684
4.2. Bantuan	7.559.322	13.321.494	13.881.211
5. Penerimaan pembangunan	502.920	285.255	0
5.1. Pinjaman pemerintah daerah	502.920	285.255	0
5.2. Pinjaman BUMD	0	0	0
<b>B. PENGELUARAN RUTIN</b>	<b>25.584.736</b>	<b>38.000.492</b>	<b>37.234.323</b>
1. Belanja pegawai	17.089.940	25.877.220	23.799.302
2. Belanja barang	4.808.747	4.355.945	5.475.202
3. Biaya pemeliharaan	662.495	944.119	566.718
4. Belanja Perjalanan Dinas	320.706	364.390	406.436
5. Belanja Lain - lain	2.127.024	3.914.313	3.381.484
6. Angsuran Pinjaman / Hutang dan bunga	0	141.042	102.306
7. Ganjaran/ Sumbasi/ Sumbangan	101.120	227.520	690.301
8. Pensiunan/ Bantuan dan onderstand	0	0	0
9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	467.546	2.175.943	2.812.574
10. Pengeluaran tidak disangka	7.158	0	0
<b>C. PENGELUARAN PEMBANGUNAN</b>	<b>11.246.607</b>	<b>15.945.292</b>	<b>18.798.711</b>
1. Pertanian dan Pengairan	126.120	651.750	1.379.616
2. Industri	42.000	16.000	10.000
3. Pertambangan dan Energi	20.000	0	0
4. Perhubungan dan Wisata	2.589.612	4.176.075	3.642.484
5. Perdagangan dan Koperrasi	410.703	585.664	662.429
6. Tenaga kerja Dan Transmigrasi	6.500	0	0
7. Pembangunan Daerah	1.825.630	2.421.778	1.059.382
8. Agama	30.000	50.000	30.000
9. Pendidikan dan Generasi Muda, Kebudayaan Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	978.612	2.554.455	1.219.036
10. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana ( KB )	203.194	286.267	500.791
11. Perumahan rakyat dan Pemukiman	1.669.963	1.235.891	5.639.736
12. Hukum	21.000	27.000	29.500
13. Keamanan Dan Ketertiban	29.500	209.278	40.000
14. Penerangan, Pers dan Komunikasi	86.000	196.500	46.925
15. Ilmu Pengetahuan, Tehnologi dan Penelitian	50.000	432.584	175.000
16. Aparatur Pemerintah	2.634.577	1.418.271	1.598.779
17. Pengembangan Dunia Usaha	0	0	0
18. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup	419.696	355.879	20.000
19. Subsidi/Bantuan Pembangunan Kepada daerah Bawahan untuk menyelenggarakan pemerintah Didaerah yang berasal dari pajak dan Retribusi daerah	103.500	1.317.900	2.745.031
20. Pembayaran Kembali Pinjaman	0	0	0
<b>D. JUMLAH PENGELUARAN ( B+C )</b>	<b>36.831.343</b>	<b>53.945.784</b>	<b>56.033.034</b>

PDRB KOTA KEDIRI MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR KONSTAN 1993 TAHUN 1990 - 2000  
(JUTA RUPIAH)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Lapangan Usaha	15,375	16,332	39,648	16,946	16,134	16,599	15,688	13,378	10,963	10,490	10,788
Pertanian	47	56	70	614	634	660	688	699	649	583	586
Pertambangan dan pengalihan industri	1,491,535	1,694,073	1,899,531	2,692,880	3,102,644	3,567,136	4,077,444	4,669,141	4,575,679	4,670,359	4,942,461
Listrik, Gas dan Air Bersih	6,820	8,719	10,645	9,808	10,438	11,321	12,045	13,581	13,828	14,108	15,101
Perdagangan, Hotel dan Restoran	60,986	72,501	83,151	28,973	31,410	34,315	38,176	36,649	22,074	10,939	11,094
Perdagangan, Hotel dan Restoran	345,038	476,246	659,547	627,684	681,999	746,534	822,397	848,237	834,444	855,554	905,415
Perdagangan, Hotel dan Restoran	40,428	46,117	52,178	31,875	33,932	37,641	45,699	49,151	50,662	54,201	59,847
Perdagangan, Hotel dan Restoran	109,720	118,170	117,278	172,913	171,640	182,411	195,578	198,499	180,148	152,763	157,167
Perdagangan, Hotel dan Restoran	71,717	72,821	113,731	54,067	56,295	58,658	61,490	61,992	56,008	56,594	61,018
Perdagangan, Hotel dan Restoran	2,141,666	2,505,035	2,975,777	3,635,759	4,105,126	4,655,276	5,269,205	5,891,329	5,744,454	5,825,591	6,163,476
Perdagangan, Hotel dan Restoran	841,665	905,035	975,777	1,082,378	1,139,668	1,228,135	1,336,195	1,406,043	1,345,349	1,358,533	1,423,743

Badan Pusat Statistik Kota Kediri

## Lampiran 3:

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran  
Pemerintah Kota Kediri tahun 1990.I – 2000.IV (dalam Juta Rupiah).

Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Y	Pengeluaran Pemerintah X
334634	1273.520
468483	1782.929
602340	2292.337
736194	2801.745
592192	2004.041
614903	1990.604
637614	1977.168
660324	1963.731
699872	2634.455
729234	2894.683
758655	3154.911
788076	3415.139
847066	2972.256
888315	2951.240
929564	2930.223
970814	2909.207
982278	3213.351
1011614	3322.398
1040949	3431.446
1070284	3540.493
1112242	3416.631
1146627	3012.505
1181011	3448.398
1215395	3464.280
1259745	3673.451
1298116	3766.650
1336486	3859.848
1374851	3953.046
1414508	4533.058
1453391	4820.980
1492273	5108.905
1531156	5396.828
1449883	7616.751
1440703	8677.474
1431523	9738.197
1422344	10798.921
1448792	11881.967
1453862	14951.620
1458933	14021.272
1464004	15090.925
1509192	13812.579
1530310	13943.032
1551428	14073.485
1572546	14203.930

Sumber : lampiran 1 dan 2, di olah

Lampiran 4

Analisis Hubungan Kausalitas Model Granger

Lag 1 Triwulan ( t-1)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pertumbuhan Ekonomi	1129723	340004.12	43
PDRB1	1100934	353747.09249	43
G1	5500.388	4278.60201	43

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	G1, PDRB1 <sup>a</sup>		Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	.992 <sup>a</sup>	.985	.984	42833.83	.985	1303.165	2	40	.000	1.697

- a. Predictors: (Constant), G1, PDRB1
- b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	4.78E+12	2	2.391E+12	1303.165	***
Regression	7.34E+10	40	1834736770		
Residual	4.86E+12	42			
Total					

a. Predictors: (Constant), G1, PDRB1

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations		Collinearity Statistics			
					B	Std. Error	Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance
1	(Constant)	.81577	.725	23540.059	.001	34001.490	129154.0	.992	.984	.679	.472	2.120
	PDRB1	.950	.027	34.907	.000	.895	1.005	.724	.033	.004	.472	2.120
	G1	.474	2.249	.211	.834	-4.072	5.020					

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Lanjutan

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pengeluaran Pemerintah	5801.095	4426.29384	43
G1	5500.388	4278.60201	43
PDRB1	1100934	353747.09249	43

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PDRB1, G1		Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Pengeluaran, Pemerintah

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson		
					R Square Change	F Change	Sig. F Change			
1	.987 <sup>a</sup>	.975	.974	719.12276	.975	.775598	2	40	.000	1.979

- a. Predictors: (Constant), PDRB1, G1
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	8.02E+08	2	401090870	775.60	.000 <sup>a</sup>
Residual	20685502	40	517137.550		
Total	8.23E+08	42			

a. Predictors: (Constant), PDRB1, G1

b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Std. Error	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-328.334	395.206	-.831	.411	-1127.08	470.407				
	G1	.981	.038	25.966	.000	.904	1.057	.972	.651	.472	2.120
	PDRB1	6.69E-04	.000	1.464	.151	.000	.002	.225	.037	.472	2.120

a. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Lag 2 Triwulan ( t-2)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pertumbuhan Ekonomi	1145467	327878.20	42
PDRB2	1090208	350886.60356	42
G2	5296.267	4113.10318	42

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	G2, PDRB2 <sup>a</sup>		Enter.

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson
					F Change	df1	df2	
1	.983 <sup>a</sup>	.965	.964	62163.51	550.806	2	39	.878

- a. Predictors: (Constant), G2, PDRB2
- b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4.26E+12	2	2.128E+12	550.806	.000 <sup>a</sup>
Residual	1.51E+11	39	3864302186		
Total	4.41E+12	41			

- a. Predictors: (Constant), G2, PDRB2
- b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B			Correlations			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF		
1 (Constant)	146882.9	34183.751		4.297	.000	77739.772	216026.10							
PDRB2	.913	.040	.977	23.094	.000	.833	.993	.965	.983	.684	.490	2.040		
G2	.666	3.372	.008	.198	.844	-6.153	7.486	.032	.706	.006	.490	2.040		

- a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Lanjutan

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pengeluaran Pemerintah	5896.766	4434.72209	42
G2	5296.267	4113.10318	42
PDRB2	1090208	350886.60356	42

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PDRB2, G2		Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson		
					R Square Change	F Change	Sig. F Change			
1	.975 <sup>a</sup>	.951	.946	1010.24209	.951	375.535	2	39	.000	.648

- a. Predictors: (Constant), PDRB2, G2
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7.67E+08	2	383267093.8	375.535	.000 <sup>a</sup>
Residual	39802974	39	1020589.084		
Total	8.06E+08	41			

a. Predictors: (Constant), PDRB2, G2

b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-773.947	555.533		-1.393	.171	-1897.618	349.724				
G2	.959	.055	.889	17.494	.000	.848	1.069	.942	.622	.490	2.040
PDRB2	1.462E-03	.001	.116	2.276	.028	.000	.003	.342	.081	.490	2.040

a. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Lag 3 Triwulan ( t- 3)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pertumbuhan Ekonomi	1158714	320370.37	41
PDRB3	1079474	348194.06166	41
G3	5085.370	3927.56987	41

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	G3, PDRB3 <sup>a</sup>		Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R		Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson	
	R	Square			F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	.976 <sup>a</sup>	.952	.949	72273.35	373.987	2	38	.000	.711

- a. Predictors: (Constant), G3, PDRB3
- b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3.91E+12	2	1.953E+12	373.987	.000 <sup>a</sup>
Residual	1.98E+11	38	5223437599		
Total	4.11E+12	40			

a. Predictors: (Constant), G3, PDRB3

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Tolerance	VIF
1 (Constant)	191791.4	39761.019		4.824	.000	111299.4	272283.3				
PDRB3	.893	.046	.971	19.402	.000	.800	.986	.976	.953	.508	1.967
G3	.571	4.081	.007	.140	.889	-7.689	8.832	.688	.023	.508	1.967

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

lanjutan

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pengeluaran Pemerintah	5984.679	4452.60704	41
G3	5085.370	3927.56987	41
PDRB3	1079474	348194.06166	41

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PDRB3, G3		Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	.956 <sup>a</sup>	.913	.909	1346.16734	.013	100.80	2	33	.000	.591

- a. Predictors: (Constant), PDRB3, G3
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7.24E+08	2	362082003.0	199.800	.000 <sup>a</sup>
Residual	68864374	38	1812220.357		
Total	7.93E+08	40			

a. Predictors: (Constant), PDRB3, G3

b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Tolerance	VIF	
1 (Constant)	-1460.644	740.602		-1.972	.056	-2959.915	38.626	.944	.889	.571	.508	1.967
G3	.908	.076	.801	11.942	.000	.754	1.062	.944	.444	.146	.508	1.967
PDRB3	2.621E-03	.001	.205	3.057	.004	.001	.004	.766	.444	.146	.508	1.967

a. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Lag 4 Triwulan ( t-4)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pertumbuhan Ekonomi	1169277	317138.69	40
PDRB4	1068731	345679.94522	40
G4	4867.190	3717.47060	40

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	G4, PDRB4 <sup>a</sup>		Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson
					F Change	df1	df2	
1	.977 <sup>a</sup>	.955	.952	69290.14	389.998	2	37	.525

- a. Predictors: (Constant), G4, PDRB4
- b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3.74E+12	2	1.872E+12	389.998	.000 <sup>a</sup>
Residual	1.78E+11	37	4801123016		
Total	3.92E+12	39			

a. Predictors: (Constant), G4, PDRB4

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Tolerance	VIF
1 (Constant)	210022.5	38131.649		5.508	.000	132760.451	287284.573				
PDRB4	.899	.044	.980	20.319	.000	.810	.989	.977	.958	.711	.526
G4	-.403	4.116	-.005	-.098	.922	-8.743	7.936	.670	-.016	-.003	.526

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Lanjutan

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pengeluaran Pemerintah	6064.252	4479.70934	40
G4	4867.190	3717.47060	40
PDRB4	1068731	345679.94522	40

Variables Entered/Removed<sup>d</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PDRB4, G4		Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	Sig. F Change		
1	.942 <sup>a</sup>	.887	.851	1543.04907	887	145.852	2	.000	.395

- a. Predictors: (Constant), PDRB4, G4
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6.95E+08	2	347273510.1	145.852	.000 <sup>a</sup>
Residual	88097016	37	2381000.438		
Total	7.83E+08	39			

a. Predictors: (Constant), PDRB4, G4

b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations		Collinearity Statistics				
					B	Std. Error	Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Tolerance	VIF	
1 (Constant)	-2276.441		-2.681	.011	-3997.02	849.169	-555.862	1.039	.916	.837	.513	.526	1.902
G4	.853	.092	9.307	.000	.667	.092	1.039	1.039	.916	.837	.513	.526	1.902
PDRB4	3.919E-03	.001	3.976	.000	.002	.001	.006	.006	.790	.547	.219	.526	1.902

a. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Lag 5 Triwulan ( t- 5)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pertumbuhan Ekonomi	1184074	306977.41	39
PDRB5	1058596	344125.26949	39
G5	4605.043	3370.76842	39

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	G5, PDRB5 <sup>a</sup>		Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Model Summary<sup>a</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	.911 <sup>a</sup>	.944	.940	74921.32	.944	300.974	2	36	.000	.401

- a. Predictors: (Constant), G5, PDRB5
- b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3.38E+12	2	1.689E+12	300.974	.000 <sup>a</sup>
Residual	2.02E+11	36	5613203717		
Total	3.58E+12	38			

a. Predictors: (Constant), G5, PDRB5

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics			
	B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF		
1 (Constant)	263449.8	41245.400		6.387	.000	179800.24	347099.34							
PDRB5	.875	.049	.981	17.968	.000	.777	.974	.949	.711	.525	1.903			
G5	-1.335	4.974	-.015	-.268	.790	-11.423	8.754	-.045	-.011	.525	1.903			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Lanjutan

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pengeluaran Pemerintah	6168.360	4488.98073	39
G5	4605.043	3370.76842	39
PDRB5	1058596	344125.26949	39

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PDRB5, G5		Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Model Summary<sup>a</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	.931 <sup>a</sup>	.868	.860	1678.26263	.868	117.934	2	36	.000	.304

- a. Predictors: (Constant), PDRB5, G5
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6.64E+08	2	332169832.9	117.934	.000 <sup>a</sup>
Residual	1.01E+08	36	2816565.472		
Total	7.66E+08	38			

a. Predictors: (Constant), PDRB5, G5

b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics			
	B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF		
1 (Constant)	-2920.115	923.911		-3.161	.003	-4793.893	-1046.337							
G5	.838	.111	.629	7.519	.000	.612	1.064	.890	.782	.456	.525	1.903		
PDRB5	4.941E-03	.001	.379	4.527	.000	.003	.007	.812	.602	.275	.525	1.903		

a. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Lampiran 5  
Regresi Distribusi Lag PDRB terhadap Pengeluaran Pemerintah  
PDRB 1 Triwulan ( t )

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pengeluaran Pemerintah Y3	5698.196 1.8E+18	4427.45213 1.276E+18	44 44

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Y3 <sup>a</sup>	.	Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson		
					R Square Change	F Change	Sig. F Change			
1	.806 <sup>a</sup>	.649	.641	2654.13612	.649	77.655	1	42	.000	.130

- a. Predictors: (Constant), Y3
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression 5.47E+08	1	547033874.5	77.655	.000 <sup>a</sup>
	Residual 2.96E+08	42	7044438.529		
	Total 8.43E+08	43			

- a. Predictors: (Constant), Y3
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations		Collinearity Statistics													
					B	Std. Error	Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Tolerance	VIF										
1	(Constant) Y3																					

- a. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Lag PDRB 1 Triwulan ( t - 1 )

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pengeluaran Pemerintah	5801.095	4426.29384	43
LY1	1.3E+12	7.391E+11	43

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LY1 <sup>a</sup>		Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson		
					R Square Change	F Change	Sig. F Change			
1	.785 <sup>a</sup>	.617	.608	2772.48024	.617	66.052	1	41	.000	.095

- a. Predictors: (Constant), LY1
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.08E+08	1	507714728.3	.000 <sup>a</sup>
	Residual	3.15E+08	41	7686646.656	
	Total	8.23E+08	42		

- a. Predictors: (Constant), LY1
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations		Collinearity Statistics											
					B	Std. Error	Lower Bound	Upper Bound	Partial	Zero-order	Tolerance	VIF								
1	(Constant)				-475.770	880.482	-2253.94	1302.400												
	LY1	.785	8.127	.592	4.704E-09	.000	.000	.000	.785	.785	.785	1.000	1.0							

- a. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Lag PDRB 2 Triwuliah ( t -2)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pengeluaran Pemerintah LY2	5896.766 1.3E+12	4434.72209 7.286E+11	42 42

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LY2 <sup>a</sup>		Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson		
					R Square Change	F Change	Sig. F Change			
1	.796 <sup>a</sup>	.634	.625	2717.08348	.634	69.222	1	40	.000	.110

- a. Predictors: (Constant), LY2
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression 5.11E+08	1	511035456.2	69.222	.000 <sup>a</sup>
	Residual 2.95E+08	40	7382542.640		
	Total 8.06E+08	41			

- a. Predictors: (Constant) LY2
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B			Correlations			Collinearity Statistics		
					B	Std. Error	Beta	Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance
1	(Constant) LY2				-445.012 4.846E-09	869.929 .000	.796	-2203.2 .000	1313.18 .000	.796 .796	.796 .796	1.000 1.000	1.000 1.000

- a. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pengeluaran Pemerintah	5984.679	4452.60704	41
LY3	1.3E+12	7.189E+11	41

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LY3 <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression 5.25E+08	1	525185062.4	76.471	.000 <sup>a</sup>
	Residual 2.68E+08	39	3867777.363		
	Total 7.93E+08	40			

a. Predictors: (Constant), LY3

b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	Sig. F Change	
1	.814 <sup>a</sup>	.662	.654	2620.64446	.063	76.471	.000	.113
						df1	df2	
						1	39	

a. Predictors: (Constant), LY3

b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B			Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant) LY3	-485.119 5.041E-09	.814	-574 8.745	.569 .000	-2195.32 .000	1225.080 .000	.814 .814	.814 .814	.814 .814	1.000 1.000	1.000 1.000	

a. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah



Lag PDRB 4 Triwulan ( t - 4)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pengeluaran Pemerintah LY4	6064.252 1.3E+12	4479.70934 7.100E+11	40 40

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LY4 <sup>a</sup>		Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	Sig. F Change	
1	.837 <sup>a</sup>	.701	.693	2483.34999	.701	88.908	.000	.133
					df:1	df2		
					1	38		

- a. Predictors: (Constant), LY4
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression 5.48E+08	1	548297003.2	88.908	.000 <sup>a</sup>
	Residual 2.34E+08	38	6167027.187		
	Total 7.83E+08	39			

- a. Predictors: (Constant), LY4
- b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Coefficients<sup>a</sup>

Model	(Constant) LY4	Unstandardized Coefficients		Std. Error	t	Sig.	95% Confidence Interval for B			Correlations		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Tolerance	VIF	
1		-583.301 5.281E-09	806.974 .000	-.723 9.429	.474 .000	-2216.93 1050.332	.000 .000	.837 .837	.837 .837	1.000 1.000	1.000 1.000		

- a. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah